



RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016-2021



Tinjau SD di Kecamatan Rupert Utara
dalam Rangka Kunker Bupati Bengkalis Bersam Gubernur Riau

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN
2017

Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya sehingga dokumen “**Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Begkalis Tahun 2016 - 2021**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (2016 - 2021).

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, terhadap data yang ada, ide-ide, masukan dan analisis yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang pendidikan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya – upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bengkulu. Kami mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota tim RENSTRA Dinas Pendidikan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu pada khususnya, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menghadapi persaingan secara global.

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**

EDI SAKURA, S.Pd., M.Pd
Pembina/(IV/a)
NIP. 19660514 198811 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan	32
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan	34
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	38
3.3. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau	40
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	45
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	45
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	48
4.2. Tujuan dan Sasaran	48
4.3. Strategi dan Kebijakan	53
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	54
BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB VII : PENUTUP	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan: Pertanian No. 007 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: disdikbengkalis17@gmail.com
Web: www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 225/KPTS-DISDIK/VIII/2017

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan;
- b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021;
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 23 Agustus 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS,

A
EDI SAKURA, S.Pd., M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia yang dijamin undang-undang, untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang menjamin **ketersediaan** layanan pendidikan, memperluas **keterjangkauan** layanan pendidikan, meningkatkan **kualitas** dan relevansi pendidikan, mewujudkan **kesetaraan** bagi semua warga Negara dalam layanan pendidikan dan menjamin **kepastian** layanan pendidikan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di daerah menjadi factor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan pendidikan.

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis selanjutnya disingkat (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD. Renstra OPD Dinas Pendidikan adalah dokumen perencanaan OPD Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan Renstra ini menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Renstra OPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Kualitas penyusunan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi serta menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam Renstra. Renstra menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni (a) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tercapai. Penyusunan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat mempertajam tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Dinas Pendidikan dalam tahapan penyusunannya didasari atas analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal, dengan memperhatikan adanya kekuatan dan potensi sumber daya, kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan pendidikan dan kondisi actual yang dihadapi Dinas Pendidikan saat ini dirumuskan dalam isu-isu strategis dan disusun berdasarkan skalaprioritas. Penjabaran Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun, termasuk lokasi kegiatannya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
 14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh apararat Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Mengetahui kinerja Dinas Pendidikan pada periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun;
6. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis;
7. Sebagai instrument bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan.

BAB III Isu Strategis

Pada bab ini berisi uraian tentang permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi uraian tentang tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bab ini berisi uraian tentang Visi, Misi, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini berisi uraian tentang indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VII Penutup

Pada bab ini berisi uraian tentang harapan-harapan kerja sama seluruh stakeholder, tokoh-tokoh pendidikan di Kabupaten Bengkalis khususnya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang cerdas dan berkarakter.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pendidikan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan pemaknaan terhadap hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendidikan periode ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Kabupaten Bengkulu serta Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah (SMP);
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, dan Pendidikan Non Formal;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD; dan
 - 3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Unit Pelaksana Teknis, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

1. Kepala

Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.

- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan penduduku di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, pembinaan SD, pembinaan SMP, pembinaan ketenagaan.
- f. Pelaksanaan Administrasi dinas pendidikan, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas pendidikan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepaladinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dinidan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal.

- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama.
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama.
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- c. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- e. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten.
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Pendidikan

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja UPT Pendidikan di Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dan pelayanan administrasi pendidikan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan dengan wilayah kerja masing-masing.

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan mempunyai tugas:

1. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan pendidikan di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal.
3. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal.

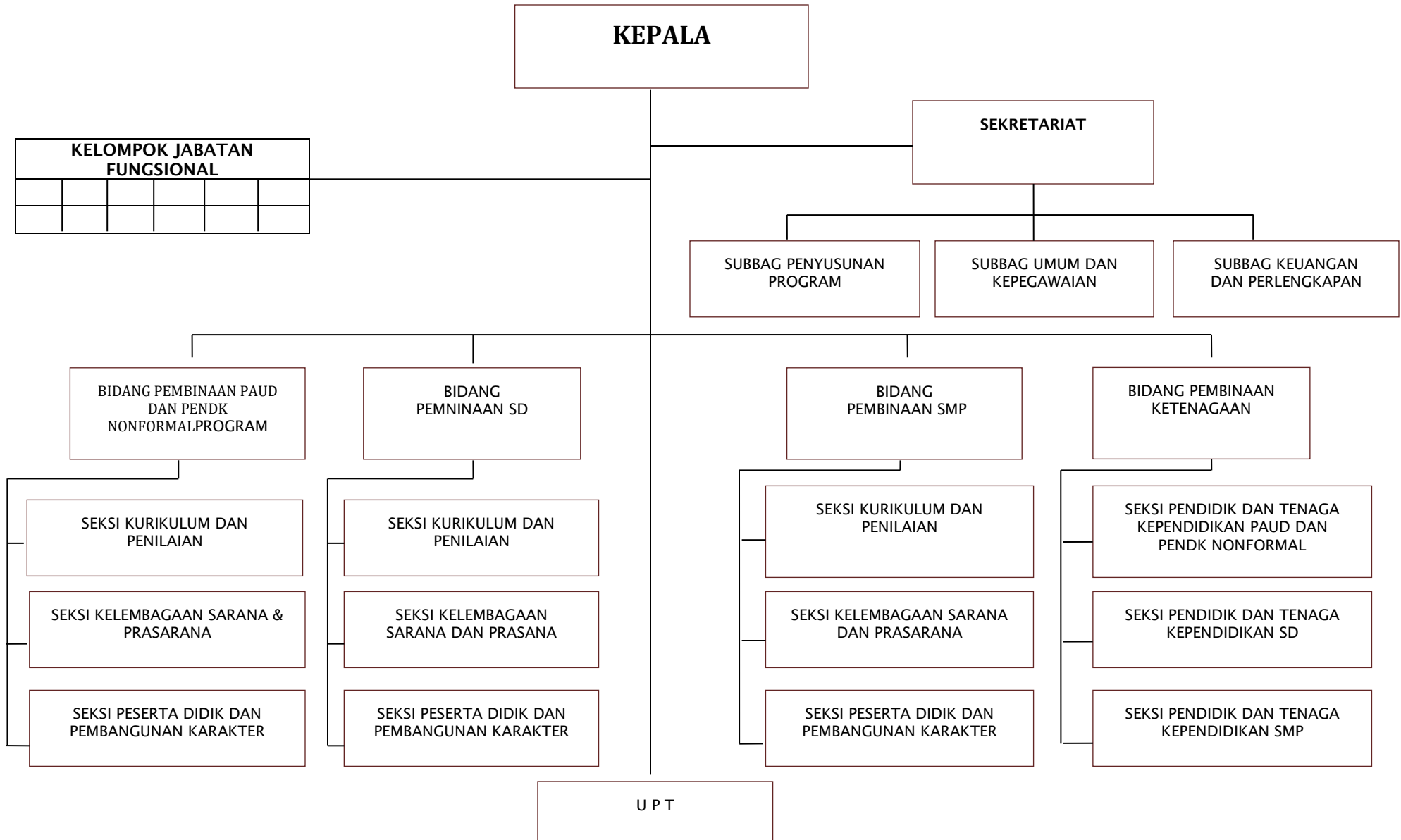
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan pendidikan non formal
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Pendidikan.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Jabatan Fungsional, dengan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan dan dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan pada keahlian tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam regulasi sistem pendidikan pada setiap jenjang yang menjadi kewenangannya. Jabatan fungsional dibentuk mengandung maksud sebagai berikut:

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan bebas dan kerja.
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu



2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini disebabkan oleh kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang tersedia. Sumber daya manusia dalam system pendidikan meliputi tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang ada. Jumlah SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menurut kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin yang tersedia berjumlah 216 pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Unit Kerja	Pendidikan Formal								
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	1	0	66	0	0	7	42	10	1
2	UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	0	1	41	4	2	9	39	4	0
3	Pengawas						12	19	2	
4	Guru			294	26	378	115	5877	118	2
JUMLAH		1	1	401	30	380	143	5977	134	3

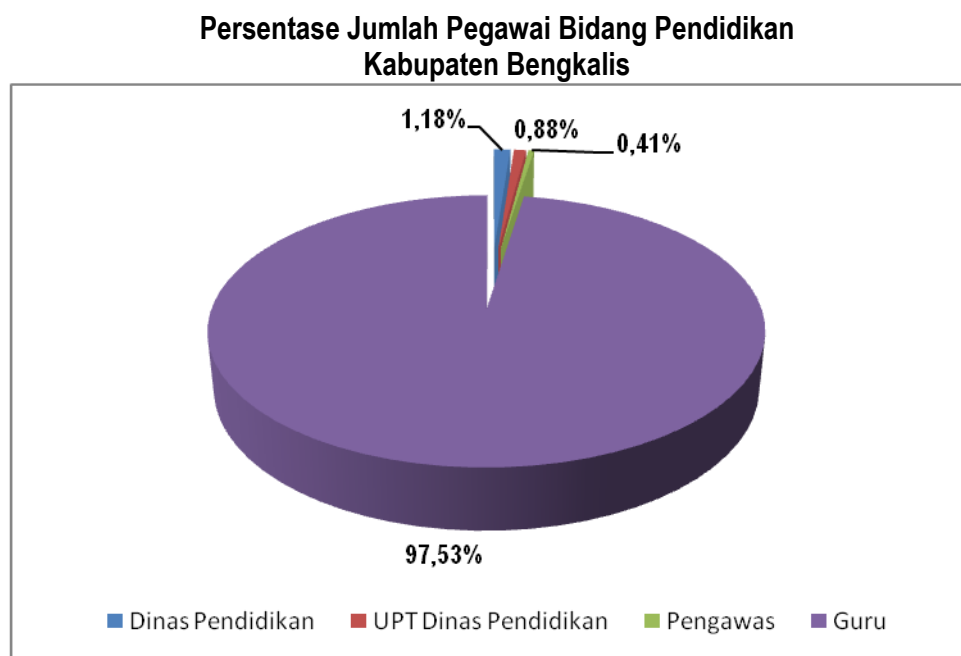
Berdasarkan klasifikasi pendidikan pegawai urusan pendidikan paling banyak adalah lulusan S1 sebanyak 5.977 orang (84,5%), kemudian disusul oleh lulusan SMA sebanyak 406 orang (5,7%). Untuk lulusan magister sebanyak 136 orang (1,9%) dan doctor 3 orang (0,04%). Meskipun lulusan magister dan doctor masih berada di bawah 2 persen tidak berarti bahwa kualitas SDM yang menangani urusan pendidikan masih rendah, hal ini didukung dengan lulusan Sarjana (S1) berada di atas 80 persen.

Jumlah guru di Kabupaten Bengkalis berjumlah 12.002 orang, sebagian besar guru di Kabupaten Bengkalis adalah perempuan sebanyak 72 persen dan guru laki-laki sebanyak 28 persen.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON						JUMLAH
		I	II	III	IV	Non Eselon	Non PNS	
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	-	1	5	15	66	40	127
2	UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	-	-	-	8	54	38	100
3	Pengawas	-	-	-	-	33	-	33
4	Guru	-	-	-	-	3551	3259	6810
JUMLAH		0	1	5	23	6963	5.270	12.262

Jumlah pegawai bidang di Kabupaten Bengkalis didominasi oleh guru sebanyak 98 persen dan yang paling sedikit adalah pengawas sekolah sebanyak 0,41 persen.



**TABEL 2.3
JUMLAH TENAGA PENDIDIK/GURU**

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	BKS		BANTAN		BUKIT BATU		SIAK KECIL		MANDAU		PINGGIR		RUPAT		RUPAT UTARA		JUMLAH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PAUD	7	143	2	91	1	92	1	87	3	64		48	9	98		8	23	631
	TK	7	122	5	73	1	70	2	35	10	336	6	139		45		26	31	846
JUMLAH		14	265	7	164	2	162	3	122	13	400	6	187	9	143		34	54	1477
2	DIKDAS																		
	SD	279	666	157	237	109	286	80	165	265	1519	126	528	161	258	62	82	1239	3741
	MI	-	-	28	41	-	-	-	-	20	133	4	25	-	-	-	-	52	199
	SMP	95	206	49	79	42	102	25	49	121	600	77	236	48	60	18	21	475	1353
	MTs.	59	106	62	75	14	28	5	11	42	81	30	68	43	37	6	7	261	410
JUMLAH		43	978	296	432	165	416	116	225	448	2333	237	857	252	355	86	110		2499

TABEL 2.4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO.	JENIS PENDIDIKAN	BKS		BANTAN		BUKIT BATU		SIK KECIL		MANDAU		PINGGIR		RUPAT		RUPAT UTARA		JUMLAH	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	PAUD																		
	KB	0	39	0	21	0	21	0	21	0	24	0	15	0	24	0	4	0	169
	SPS	0	7	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15
	TPA	0	4	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10
	RA	0	5	0	6	0	0	0	0	0	19	0	4	0	0	0	0	0	34
	TK	1	18	1	18	1	13	1	6	0	68	0	40	0	13	0	5	4	181
JUMLAH		1	73	1	51	1	35	1	28	0	117	0	59	0	37	0	9	4	409
		74		52		36		29		117		59		37		9		413	
2	DIKDAS																		
	SD	56	3	32	-	30	2	21	-	85	17	40	4	30	4	11	2	305	32
	MI	-	-	1	3	-	-	-	-	-	12		5	-	-	-	-	1	20
	SMP	11	3	8		7	2	5		17	11	15	5	9	1	3	1	75	23
	MTs.	1	8	1	8	1	2		2		14		9		6		1	3	50
JUMLAH		68	14	32	11	38	6	26	2	102	54	55	23	36	11	14	4	384	125
		82		43		44		28		156		78		47		18		509	

Jumlah sekolah untuk setiap jenjang tergambar sebagai berikut, yaitu PAUD 413 buah, SD/MI 358, dan SMP/MTs. 151 buah sekolah, sementara jumlah siswa untuk setiap jenjang tergambar pada table 2.5 yaitu PAUD 9.428 orang, SD/MI 105.002 orang, SMP/MTs. 34.171 orang siswa.

TABEL 2.5
JUMLAH SISWA JENJANG PENDIDIKAN PAUD dan SD/MI TAHUN 2016

NO.	JENIS PENDIDIKAN	KELAS I		KELAS 2		KELAS 3		KELAS 4		KELAS 5		KELAS 6		JUMLAH	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	TK/RA/SPS														
	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739
	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992
	B.BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.114
	SIK KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
	MANDAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.165
	PINGGIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479
	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946
	R.UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
JUMLAH															9.428
2	SD														
	BENGKALIS	998	821	894	777	945	825	873	850	880	823	932	849	5.564	4.467
	BANTAN	393	362	390	352	388	331	347	318	360	311	332	280	2.210	2.054
	B.BATU	501	448	441	399	433	387	438	374	368	403	416	364	2.595	2.376
	SIK KECIL	297	278	284	288	267	255	250	210	248	258	219	239	2.196	1.469
	MANDAU	3013	2631	2958	2757	3029	2779	2918	275	2938	2609	2745	2529	42.286	16.085
	PINGGIR	1084	1083	1196	1120	1177	1040	1155	1075	1107	1002	1080	984	6.782	6.283

	RUPAT	442	441	442	424	366	400	434	354	383	374	387	385	2.445	2.273
	R.UTARA	225	187	222	207	187	185	190	159	183	181	184	192	1.199	1.112
JUMLAH		6953	6251	6827	6324	6792	6202	6605	3615	6467	5961	6295	5822	65.277	36.119
		13204		13151		12994		10220		12428		12117		101.396	
3	MI														
	BANTAN	53	30	28	20	33	30	25	31	19	21	33	34	191	166
	MANDAU	245	216	181	176	152	152	158	150	160	109	114	105	1.010	908
	PINGGIR	165	169	134	126	110	119	122	91	92	97	65	61	688	663
JUMLAH		463	415	434	322	295	301	305	272	271	207	212	200	1.869	1.737
		878		756		596		577		478		412		3.606	

Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku bahwa proses pembelajaran yang efektif dapat dibangun jika rasio guru dan siswa menunjukkan pada tingkat yang ideal. Tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bengkalis jumlah guru 4.980 orang (table 2.3) sedangkan jumlah siswa 101.396 orang (table 2.5). Dengan demikian tergambar bahwa rasio guru dan siswa adalah 1 :21. Perbandingan ini memiliki makna bahwa satu orang guru membimbing 20 orang siswa, sedangkan rasio guru dan siswa dalam standard pelayanan pendidikan nasional 1 : 20 SPM.

TABEL 2.6
JUMLAH SISWA SMP/MTs. KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

NO.	JENIS PENDIDIKAN	KELAS I	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4	KELAS 5	KELAS 6	JUMLAH	
	SMP								
	BENGKALIS	531	524	559	505	508	441		1598
	BANTAN	213	211	186	204	212	218		611
	B.BATU	310	261	281	263	255	252		846
	SIK KECIL	188	163	163	178	158	141		509
	MANDAU	2184	2163	2303	2135	2226	2065		6713
	PINGGIR	924	860	958	870	863	831		2745
	RUPAT	302	276	247	273	253	247		802
	R.UTARA	119	158	132	116	103	128		354
JUMLAH		4771	4616	4829	4544	4578	4323		14178
		9387		9373		8901			27661
5	M Ts.								
	BENGKALIS	323	268	280	240	234	192		837
	BANTAN	324	168	179	157	148	121		651
	B.BATU	102	103	95	91	97	79		297
	SIK KECIL	10	13	9	13	7	7		26
	MANDAU	352	325	314	232	274	278		940
	PINGGIR	120	144	136	109	113	114		369
	RUPAT	82	79	80	82	64	72		226
	R.UTARA	21	21	22	20	6	24		67
JUMLAH		1.530	1.091	1.115	944	943	887		3.588
		2.621		2.059		1.830			6.510

Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku bahwa proses pembelajaran yang efektif dapat dibangun jika rasio guru dan siswa menunjukkan pada tingkat yang ideal. Tingkat pendidikan sekolah menengah (SMP) di Kabupaten Bengkalis jumlah guru 1.828 orang guru (table 2.3) sedangkan jumlah siswa 27.661 orang (table 2.5). Dengan demikian tergambar bahwa rasio guru dan siswa adalah 1 :16. Perbandingan ini memiliki makna bahwa satu orang guru membimbing 16 orang siswa.

TABEL 2.7
ANGKA KELULUSAN SD/MI, SMP/MTs. DAN ANAK USIA WAJAR 9 TAHUN DAN PUTUS SEKOLAH
SE-KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

NO.	JENIS PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN				JLH SISWA SD/MI 7 – 12 TAHUN		JLH SISWA SMP/MTs. 13 – 15 TAHUN		PUTUS SEKOLAH		KET
		SD/MI		SMP/MTs.		SD/MI		SMP/MTs.		SD/MI	SMP/MTs	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015			
1	BENGKALIS	1.729	1.797	1.484	1.374	9.294	10.531	3.585	4.607	0	6	
2	BANTAN	731	679	639	698	3.552	4.521	1.831	2.340	0	0	
3	B.BATU	822	780	638	677	4.204	4.971	1.683	2.182	1	0	
4	SIK KECIL	459	458	313	313	2.591	3.035	784	1050	0	0	
5	MANDAU	5.761	5.491	4.461	4.805	31.250	35.604	11.389	14.786	22	0	
6	PINGGIR	2.395	2.179	1.757	1.905	11.824	14.396	4.593	6.050	0	12	
7	RUPAT	741	768	625	632	4.064	4.818	1.525	2.059	0	0	
8	R.UTARA	345	376	236	259	1.907	2.311	627	868	3	0	
JUMLAH		12.983	12.528	10.153	10.663	68.686	0	80.187	0	26	18	

TABEL 2.8
JUMLAH ROMBEL SEKOLAH DASAR DAN SMP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

NO	JENIS PENDIDIKAN/ KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL										
		SD							SMP			
		ROMB K1	ROMB K2	ROMB K3	ROMB K4	ROMB K5	ROMB K6	JUMLAH	ROMB K7	ROMB K8	ROMB K9	JUMLAH
1	BENGKALIS	76	73	80	70	72	75	446	41	45	37	123
2	BANTAN	36	37	38	34	34	33	212	19	18	17	54
3	B. BATU	44	39	38	40	35	36	232	23	22	20	65
4	SIK KECIL	28	25	27	23	24	21	148	13	14	12	39
5	MANDAU	211	214	216	204	202	193	1240	142	141	140	423
6	PINGGIR	82	83	82	84	79	74	484	61	59	57	177
7	RUPAT	42	45	42	39	37	38	243	22	19	20	61
8	R. UTARA	17	19	17	16	16	17	102	9	8	8	25
JUMLAH		536	535	540	510	499	487	3107	330	326	311	967

TABEL 2.9

**JUMLAH RUANG KELAS SD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DAN KONDISI RUANG KELAS					JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	
1	BENGKALIS	79	274	50	30	7	440
2	BANTAN	34	145	14	23	12	228
3	B. BATU	57	161	16	19	0	253
4	SIK KECIL	11	100	9	18	12	150
5	MANDAU	455	521	31	23	10	1040
6	PINGGIR	169	251	29	19	1	469
7	RUPAT	71	132	12	32	8	255
8	R. UTARA	31	59	6	9	1	106
	JUMLAH	907	1643	167	173	51	2941

Pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bengkulu, ruang kelas yang tersedia untuk melaksanakan proses pembelajaran terdapat 2.941 ruang (tabel 2.9) sedangkan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran berjumlah 101.396 siswa (table 2.5). Keadaan ini menggambarkan bahwa setiap kelas diisi lebih kurang 35 siswa dan jumlah yang demikian sudah menggambarkan kelas yang baik dan komunikatif dalam proses pembelajaran untuk tingkat SD.

TABEL 2.10
JUMLAH RUANG KELAS SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DAN KONDISI RUANG KELAS					JUMLAH
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	
1	BENGKALIS	20	110	1	6	0	137
2	BANTAN	17	32	1	1	13	64
3	B. BATU	4	40	7	0	0	51
4	SIK KECIL	11	25	4	0	0	40
5	MANDAU	114	277	4	0	0	395
6	PINGGIR	84	93	5	5	0	187
7	RUPAT	6	50	6	4	0	66
8	R. UTARA	0	12	5	7	2	26
	JUMLAH	256	639	33	23	15	966

Pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bengkulu, ruang kelas yang tersedia untuk melaksanakan proses pembelajaran terdapat 966 ruang (tabel 2.9) sedangkan jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran berjumlah 27.661 siswa (table 2.5). Keadaan ini menggambarkan bahwa setiap kelas diisi lebih kurang 29 siswa dan jumlah yang demikian sudah menggambarkan kelas yang baik dan komunikatif dalam proses pembelajaran.

TABEL 2.11
Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	Non PNS	
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu	3	38	28	18	40	127
2	UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu	3	-	24	35	38	100
3	Pengawas	-	-	7	26	-	33
4	Guru	15	782	1583	1171	3259	6810
	JUMLAH	21	820	1642	1250	3337	7070

Jumlah pegawai menurut golongan yang paling banyak adalah non PNS sebanyak 3.337 orang (49,3%), kemudian golongan III sebanyak 1.642 orang (22%), golongan IV sebanyak 1.250 orang (14%), golongan II sebanyak 820 (10%), golongan I sebanyak 21 orang (0,06%).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

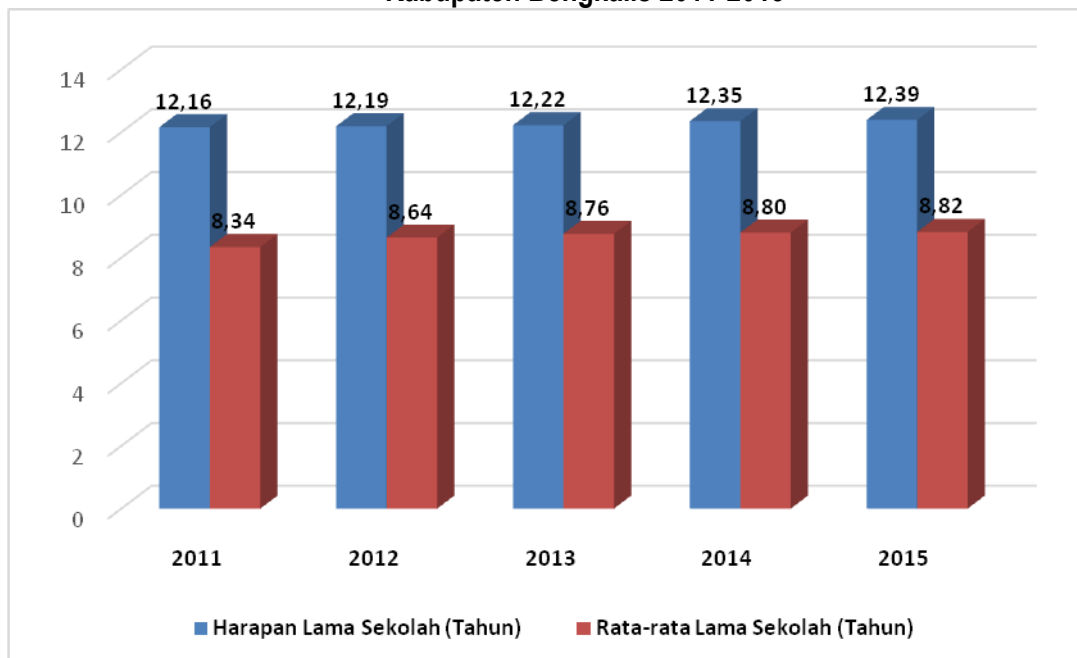
Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa.

Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertekad mewujudkan insan yang bernalar, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal, informal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Komponen pendidikan pada indikator harapan lama sekolah menunjukkan keterjaminan masyarakat di Kabupaten Bengkalis dapat bersekolah hingga jenjang menengah atas dengan besaran indikator 12,39 tahun pada akhir periode 2015. Namun keinginan masyarakat di Kabupaten Bengkalis terbilang cukup rendah untuk dapat bersekolah hingga jenjang menengah yang diperlihatkan kondisi indikator rata-rata lama sekolah masih belum mencapai jenjang pendidikan sembilan tahun atau sebesar 8,82 tahun hingga tahun 2015.

Tabel 2.13
Data IPM Komponen Pendidikan
Kabupaten Bengkalis 2011-2015

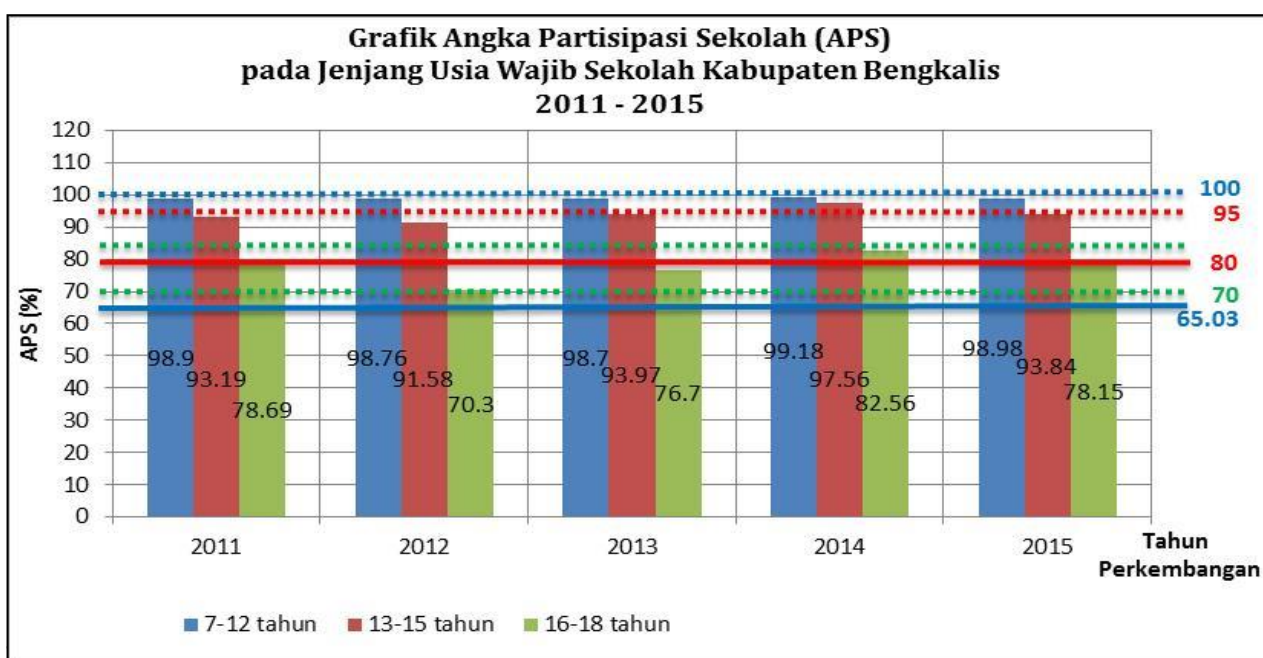


Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 (diolah)

Selain angka melek huruf, indikator angka partisipasi sekolah (APS) dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan pembangunan pendidikan pada suatu daerah. APS merupakan ukuran terhadap daya serap sekolah terhadap penduduk usia sekolah atau dapat pula dikatakan sebagai kemampuan akses penduduk usia sekolah terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan definisi di atas maka APS dapat dibagi menjadi: APS usia 7-12 tahun, APS 13-15 tahun dan APS 16-18 tahun. Perkembangan capaian APS untuk setiap jenjang penduduk usia sekolah pada tahun 2011 - 2015 dapat pada gambar 2.15 berikut ini:

Gambar 2.1
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 -2015



Grafik pada gambar di atas memperlihatkan secara umum bahwa daya serap lembaga pendidikan baik terhadap penduduk usia sekolah pada semua jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta belum dapat mencapai target akhir pembangunan periode 2011 - 2015.

Daya serap pada lembaga pendidikan setingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi masih cukup rendah dibandingkan target tahun 2015 yang menghendaki APS usia 16 - 18 tahun harus berada pada capaian 85 % dari penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Sedangkan APS usia 7 - 12 tahun dan APS usia 13 - 15 tahun sudah menunjukkan capaian yang cukup baik namun belum dapat mencapai target dari APS yang hendak dicapai pada akhir periode pembangunan 2011– 2015.

Keberhasilan pelayanan pada urusan pendidikan dapat dilihat pada enam indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai ukurannya yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Guru terhadap Murid, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan (AM) dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

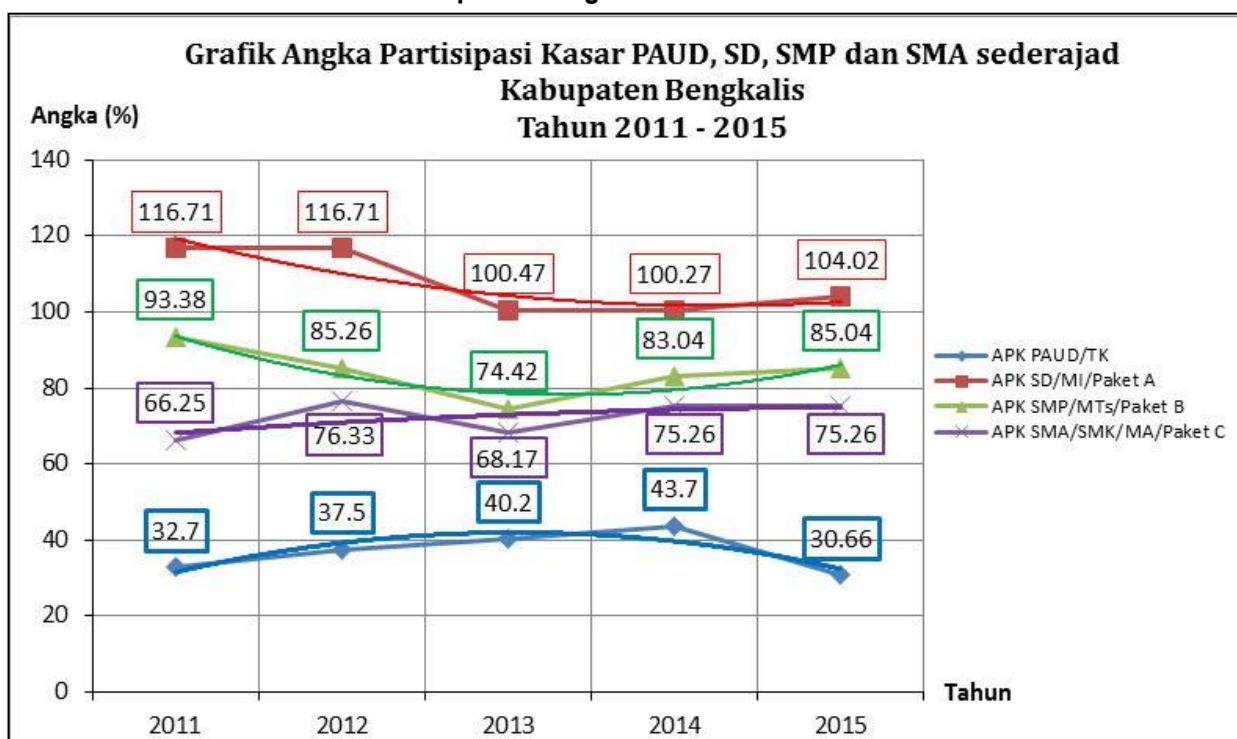
Keenam indikator yang diukur, maka terdapat lima indikator yang dinilai belum mencapai target akhir pembangunan 2015 yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan (AM) dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV. Lima indikator tersebut, ada tiga indikator yang akan menjadi fokus dalam analisis ini, yaitu:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikan ditempuh tanpa melihat batas usia sekolah yang diharuskan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik pada gambar 2.20 berikut ini memperlihatkan kondisi APK di Kabupaten Bengkalis pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyyah sederajat (SD/MI/Paket-A), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah sederajat (SMP/MTs/Paket-B) dan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah termasuk Sekolah Menengah Kejuruan sederajat (SMA/SMK/MA/Paket-C).

Gambar 2.2
Capaian APK pada Semua Jenjang Pendidikan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 -2015



Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021

Berdasarkan grafik pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa capaian APK pada semua jenjang pendidikan belum mencapai target akhir pembangunan 2015. Capaian APK PAUD dan APK SD/MI/Paket-A menunjukkan kecenderungan memburuk diakhir tahun 2015.

APK PAUD yang ditargetkan dicapai pada angka 75 % hanya dapat dicapai 30,66 % pada akhir tahun 2015. Sekalipun capaian tahun 2015 sudah melebihi angka tahun dasar 2010 yaitu sebesar 21,01 %, namun secara umum menunjukkan adanya tren penurunan dalam kurun tahun 2011 - 2015.

Sedangkan APK SD/MI/Paket-A sudah melebihi angka 100 % menurut Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar, namun dikarenakan target Pemerintah Daerah yang menghendaki peningkatan daya tampung sekolah dasar di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 sebesar 106,13 % maka capaian target APK SD/MI/Paket-A Kabupaten Bengkalis masih dibawah yang ditargetkan yaitu sebesar 104,02 % di tahun 2015, sehingga secara umum capaian APK SD/MI/Paket-A dapat dikatakan menuju perbaikan peningkatan, sekalipun tren nya sangat kecil.

Untuk APK SMP/MTs/Paket-B Kabupaten Bengkalis belum mencapai target akhir pembangunan 2010 - 2015 yaitu pada angka 103 % di tahun 2015, dimana APK SMP/MTs untuk tahun 2015 baru mencapai 85,04 %. Sedangkan tren pencapaian APK SMP/MTs/Paket-B cenderung mengalami perbaikan lebih baik dibandingkan dengan APK SD/MI/Paket-C dalam kurun waktu yang sama.

APK SMA/SMK/MA/Paket-C menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik sekalipun belum dapat mencapai target akhir pembangunan 2010 - 2015 sebesar 100 %, dimana pada akhir tahun 2015 baru APK SMA/SMK/MA/Paket-C pada angka 75,26 %, namun masih lebih tinggi dari tahun dasar 2010 yaitu sebesar 62,41 %.

Jika APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Kondisi capaian APM terhadap APK di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.14
Capaian APM dan Perbandingan Terhadap Capaian APK
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 – 2015

INDIKATOR	Base Line 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir 2015
APK SD/MI/Paket A	105,68	116,71	116,71	100,47	100,27	104,02	106,13
APM SD/MI	98,19	99,25	97,65	98,76	96,14	95,24	100
APK SMP/MTs/Paket B	86,89	93,38	85,26	74,42	83,04	85,04	103
APM SMP/MTs	82,15	88,5	95,45	91,18	90	84,5	100
APK SMA/SMK/MA/Paket C	62,41	66,25	76,33	68,17	75,26	75,26	100
APM SMA/SMK/MA	59,77	64,00	97,49	70,3	73,60	71,7	95

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021

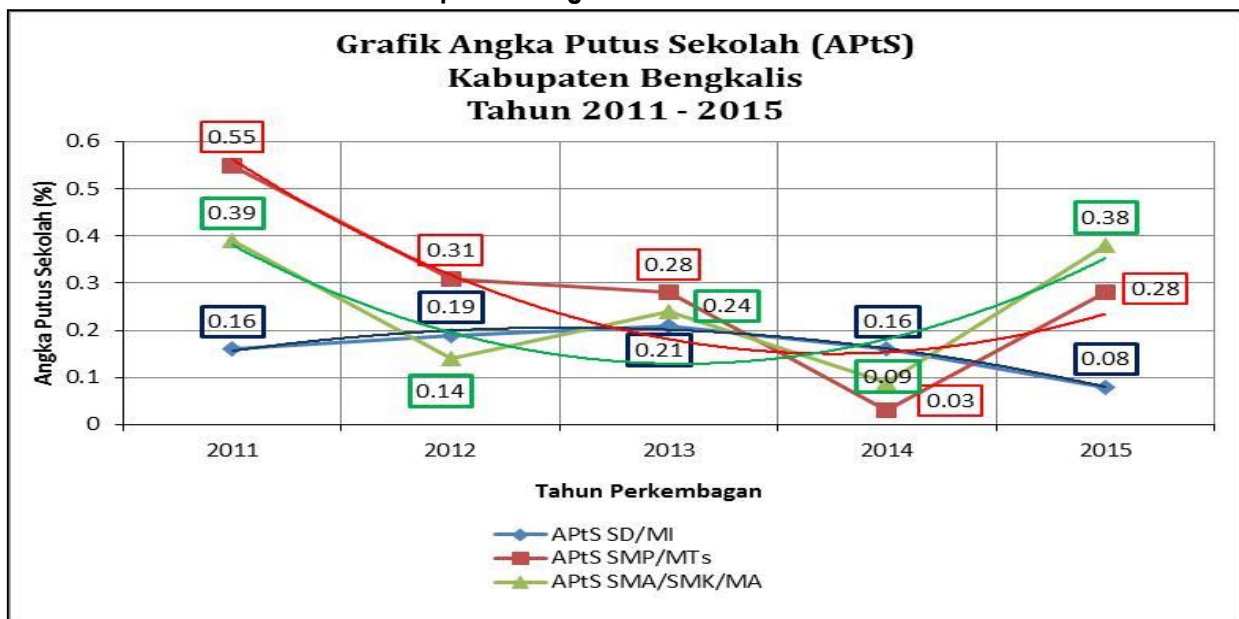
Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa status capaian peningkatan APM sesuai target akhir RPJMD tahun 2010 - 2015 berkorelasi erat dengan capaian APK pada periode yang sama. Namun, proporsi anak yang bersekolah tepat waktu di Kabupaten Bengkalis khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sudah lebih baik dari tahun dasar pembangunan 2010. Sedangkan proporsi anak yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI masih menunjukkan kondisi yang belum membaik, ini diperlihatkan angka capaian APM SD/MI pada akhir tahun 2015 sebesar 95,24 % masih lebih kecil dibandingkan dengan tahun dasar 2010 sebesar 98,19 % dan target akhir RPJMD tahun 2010 - 2015 sebesar 95,24 %.

Indikasi terhadap status capaian APK dan APM tersebut disebabkan oleh: belum efektifnya *outcome* program dan *output* kegiatan yang direncanakan dan proporsi anggaran untuk urusan pendidikan masih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

b. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka putus sekolah (APtS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Grafik pada gambar berikut ini memperlihatkan kondisi APtS di Kabupaten Bengkalis pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyyah (APtS SD/M), Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (APtS SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyyah termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (APtS SMA/SMK/MA).

Gambar 2.3
Capaian APtS pada Ketiga Jenjang Pendidikan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 –2015



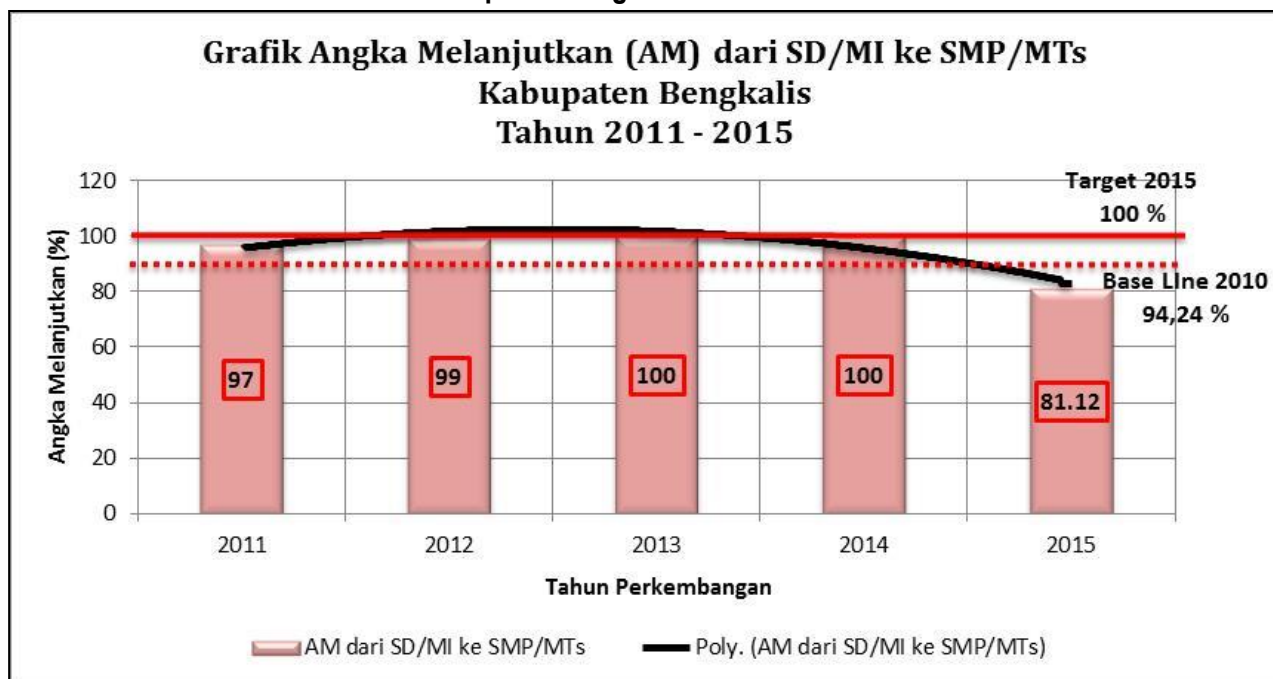
Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021

Berdasarkan grafik pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga jenjang capaian APtS menunjukkan APtS SMP/MTs dan APtS SMA/SMK/MA masih dibawah target akhir periode pembangunan 2010 - 2015 dengan kecenderungan tren perkembangan semakin memburuk dengan indikasi program dan kegiatan yang direncanakan tidak efektif untuk menurunkan APtS pada kedua jenjang tersebut.

c. **Angka Melanjutkan (AM)**

Angka melanjutkan (AM) terdiri dari tiga sub indikator yaitu: Angka Melanjutkan dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Capaian ketiga sub indikator tersebut adalah angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs masih belum dapat mencapai target akhir periode pembangunan 2010 - 2015. Kondisi capaian angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs diperlihatkan pada grafik gambar berikut ini

Gambar 2.4
Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 -2015



Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkulu 2016-2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan tren penurunan dengan status cenderung memburuk. Dimana capaian angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 81,12 % masih dibawah target akhir periode pembangunan 2010 - 2015 yaitu sebesar 100 %. angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 juga masih dibawah angka tahun dasar 2010 yang sebesar 94,24 %.

Permasalahan terhadap pencapaian target angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs juga dipengaruhi oleh indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV yang masih belum mencapai target akhir pembangunan periode 2010 - 2015 sebesar 100 %, dimana guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada akhir tahun 2015 baru mencapai 97,98 %

Berikut tabel yang menunjukkan hasil kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu selama tahun 2011-2015.

Tabel 2.15
Hasil Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Base Line	Capaian Kinerja					Interprestasi Belum (<) Tercapai (=)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka							
1.2.2	Pendidikan								
1.2.2.1	Angka Partisipasi Sekolah	Angka							
	7-12 tahun		99.25	96.24	68.9		96.56		
	13-15 tahun		88.03	65.45			74.81		
	16-18 tahun		86.50	52.49			65.83		
2.	Aspek Pelayanan Umum								
2.1	Urusan Wajib								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Angka Partisipasi Kasar:	Angka							
	- PAUD/TK		21,01	31.88	43.00	54.00	64.88	75.03	
	- SD/MI/Paket A		105,68	106.13	106.00	105.16	106.13	114.02	
	- SMP/MTs/Paket B		86,89	93.38	97.5	100.63	102	103	
	- SMA/SMK/MA/Paket C		62,42	66.25	76.33	68.17	75.26		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Base Line	Capaian Kinerja					Interprestasi Belum (<) Tercapai (=)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
2.1.1.2	Angka Partisipasi Murni:	Angka							
	- SD/MI								
	- SMP/MTs								
	- SMA/SMK/MA								
2.1.1.3	Rasio guru terhadap murid:	Angka							
	- SD/MI		1:16	1:16	1:15	1:15	1:21	1:20	=
	- SMP/MTs								
	- SMA/SMK/MA								
2.1.1.4	Angka Putus Sekolah (APS):	%							
	- SD/MI		0.16	0.19	0.21	0.12	0.08	0.8	
	- SMP/MTs		0.55	0.31	0.28	0.24	0.13	0	
	- SMA/SMK/MA		0.39	0.14	0.25	0.13	0.38	0	
2.1.1.5	Angka Melanjutkan (AM):	%							
	- dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI								
	- dari SD/MI ke SMP/MTs		94.24	95.88	97.88	99.13	99.63	97.92	
	- dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		92.62	93.88	95.63	97.25	98.88	100	
2.1.1.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	65.52	69.48	77.75	84.88	92.5		

Dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan yang disajikan pada table di atas dibutuhkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan program dan kegiatan dinas pendidikan yang digunakan untuk mencapai kinerja pelayanan dinas pendidikan tahun 2011-2015.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis (dalam jutaan)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,459	4,774	5,441	6,436	7,705	3,901	4,039	4,613	5,342	6,556	87.49	84.60	84.79	83.00	85.08	5,763	4,890
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	347	9,518	9,330	4,656	5,809	344	7,055	7,978	3,328	5,036	99.06	74.13	85.50	71.47	86.68	5,932	4,748
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				132	250				110	237	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	83.39	94.74	76	69
Program Fasilitas Pemindahan/Purna Tugas PNS		1,006					-				#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	201	-

Bab II
Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	324				156	291				27	89.58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17.53	96	64
Program Pendidikan Anak Usia Dini	13,161	11,449	6,833	12,319	9,302	4,735	8,507	5,322	8,818	7,558	35.98	74.30	77.89	71.58	81.25	10,613	6,988
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	240,922	233,019	164,886	161,601	94,234	194,759	153,542	149,589	132,779	84,431	0.81	0.66	0.91	0.82	0.90	178,932	143,020
Program Pendidikan Menengah	50,466	109,499	117,401	138,794	101,520	38,778	66,913	102,245	109,188	87,737	76.84	61.11	87.09	78.67	86.42	103,536	80,972
Program Pendidikan Non Formal	644	863	5,135	3,173	5,606	595	695	4,928	2,556	4,677	92.40	80.55	95.98	80.53	83.42	3,084	2,690
Program Pendidikan Luar Biasa	243	80	80	40	40	243	40	40	40	40	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	97	81
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,087	80,832	73,684	54,541	58,489	11,725	51,761	59,323	44,983	48,348	68.62	64.04	80.51	82.48	82.66	56,927	43,228
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5,094	11,995	17,974	66,174	28,896	3,714	5,880	13,198	54,189	24,505	72.91	49.02	73.43	81.89	84.80	26,027	20,297
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	1,089	14,440		3,500	183	1,073	10,717		6	20	98.58	74.22	#DIV/0!	0.16	10.87	3,842	2,363

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan pada lima tahun mendatang mengemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

2.1.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi nasional yang lambat dan inflasi yang cukup tinggi, berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dan sebagian orangtua dalam membiayai pendidikan.
- b. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pendidikan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan menengah terkait factor ekonomi dan budaya.
- d. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran – sasaran *Sustainable Development Goals* (SDG's), *Education for All* (EFA), dan *Human Development Index* (HDI).
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global.
- f. Ketersediaan layanan pendidikan yang tercukupi dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- g. Meningkatkan partisipasi/kemitraan dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.

2.1.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Sekalipun dalam upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada tantangan diatas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah:

- a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. Menguatnya komitmen pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.

- c. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan.
- d. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatnya daya tampung pada jenjang pendidikan tinggi.
- e. Munculnya organisasi-organisasi baru dibidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
- f. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pendidikan.
- g. Bonus Demografi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Bengkalis, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Pendidikan dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan pembangunan bidang pendidikan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi dinas pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

3.1. Identifikasi Permasalahan

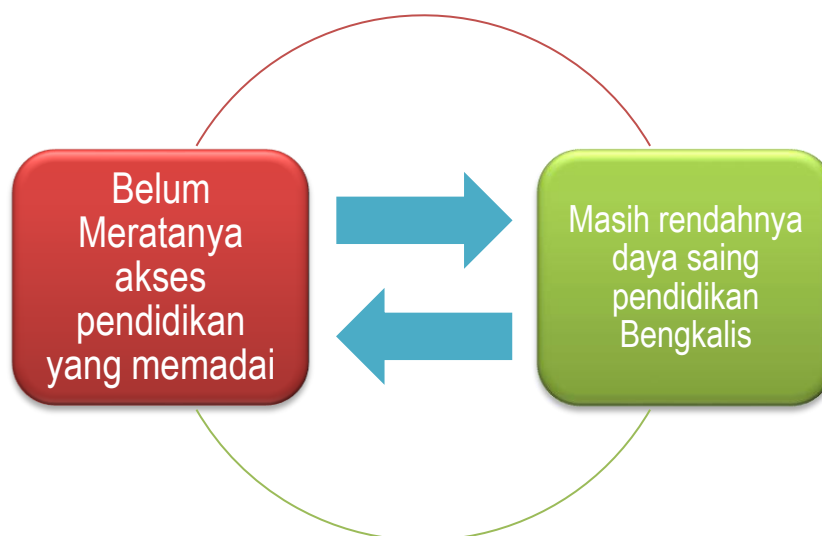
Permasalahan pembangunan perangkat daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Permasalahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan merupakan inti dari berbagai permasalahan urusan pendidikan yang digabung menjadi satu rumusan masalah pembangunan sektor pendidikan. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang relevan sehingga kebijakan publik memiliki pertimbangan matang sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang baik akan menciptakan agenda utama pembangunan dan memberikan

harapan baru bagi pemerintah dalam 5 (lima) tahun periode Renstra Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil analisis serta masukan dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka diketahui terdapat dua permasalahan utama pembangunan Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis yaitu: **Belum meratanya akses (sarana dan Prasaran) yang memadai, dan masih rendahnya daya saing pendidikan.** Kedua permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah sektor pendidikan di Kabupaten Bengkalis yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini pemetaan permasalahan utama Dinas Pendidikan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2016-2021.

Gambar 3.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Dinas Pendidikan



Terkait dengan hal tersebut, berikut penjabaran permasalahan utama pembangunan Dinas Pendidikan sebagai kajian dalam merumuskan berbagai kebijakan.

1. Belum Meratanya Akses Pendidikan yang Memadai

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikn kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara social, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk dapat belajar sepanjang hayat dengan ketersediaan akses pendidikan yang memdai. Aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan meletakkan prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan pendidikan, yaitu pelayanan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar pembentukan dan pengembangan potensi dan karakter anak sebagai usia emas (*golden age*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua desa/kelurahan mempunyai lembaga PAUD yang sesuai standar sehingga APK PAUD belum maksimal baru mencapai 47,50 persen dan perlu komitmen bersama untuk ditingkatkan.

Pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Bengkalis menjadi tantangan pemerintah daerah. Meskipun APK SD/MI pada tahun 2015 mencapai 104,02 persen dan sudah diatas 100 persen tetapi angka APK SMP/MTs pada tahun 2015 baru mencapai 85,04 persen dan masih di bawah 100 persen.

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah pokok. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan: Belum Meratanya Akses Pendidikan yang Memadai

Masalah	Akar Permasalahan
Tingginya persentase tidak tersedianya prasarana pendidikan yang memadai di satuan pendidikan	Belum optimalnya pembangunan prasaran di satuan pendidikan
	Belum meratanya pembangunan pendidikan
	Tingkat kerusakan prasarana sekolah yang tinggi
	Belum ada masterplan pembangunan pendidikan

2. Rendahnya Daya Saing Pendidikan di Bengkalis

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih rendah, hal ini dibuktikan Antara lain dengan data UNESCO tentang Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa IPM kita disbanding dengan Negara lain masih tergolong rendah.

Kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya daya saing pada sector pendidikan. Masalah yang serius dihadapi saat ini oleh pemangku pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Penyebabnya adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi.

Daya saing pendidikan di Bengkalis merupakan factor penguangkit peningkatan factor lainnya hal dimaksud disebabkan oleh tahapan-tahapan peningkatan SDM ditentukan kualitas system pendidikan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Kabupaten Bengkalis dapat bersaing dengan SDM di wilayah lain, sekurang-kurangnya di “negeri” sendiri atau di Provinsi Riau. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dihasilkan.

Belum terpenuhinya dengan optimal prasarana dan sarana pendidikan khususnya pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar (SD dan SMP) sesuai dengan syarat Standard Pelayanan Minimum. Prasarana dan Sarana Sekolah dapat berdampak kepada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Terdapatnya sejumlah sekolah dengan penumpukan guru bersatatus PNS dan peserta didik yang melebihi standard sebuah sekolah dasar berdampak kepada ketimpangan mutu pendidikan dan pelayanan sebuah sekolah kepada pesertadidiknya. Selain itu, masih terdapat sekolah yang memiliki lahan terbatas sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dimasa lalu terhadap proyeksi pertumbuhan anak usia sekolah menyebabkan pembangunan sekolah menjadi terbatas. Kemudian, masih terdapat akses menuju sekolah (jalan dan jembatan) yang belum baik menyebabkan minat menuju sekolah menjadi terbatas oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Selain itu, masih banyak peserta didik yang berasal dari masyarakat rentan miskin dan komunitas adat terpencil yang perlu mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah.

Selain pendidikan formal, pendidikan berbasis masyarakat (pendidikan luar sekolah) dan pendidikan luar biasa masih belum optimal digali potensi kependidikannya. Hal ini disebabkan masih rendahnya minat masyarakat untuk mengakses pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa. Sedangkan anggaran untuk mencukupi fasilitas dan programnya masih terbatas oleh kebutuhan prioritas pendidikan lainnya. Sementara situasi di masa mendatang pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah dan luar biasa) dapat menjadi patner pendidikan formal dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang terampil dan berkualitas. Termasuk keberadaan pesantren di Pulau Bengkalis yang memiliki potensi besar mendatangkan calon santri dari kabupaten/kota disekitarnya.

Kesiapan sumberdaya manusia berdaya saing dalam menghadapi MEA masih belum optimal, ini terlihat dari status pekerja yang didominasi oleh lulusan pendidikan menengah. Disamping itu, upaya penyiapan tenaga terampil dan bersertifikasi K3 terkendala anggaran dan sumberdaya trainer dari pemerintah di setiap BLK daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Besarnya tingkat kesejahteraan guru di Kabupaten Bengkalis tidak dibarengi dengan integritas dari para guru khususnya PNS untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga output lulusan dari jenjang dasar hingga menengah masih belum dapat bersaing baik dengan lulusan dari daerah lainnya. Sekalipun upaya peningkatan kualitas guru baik melalui pendidikan lanjutan maupun pelatihan-pelatihan mutu belum dapat menjamin tersedianya guru yang berkualitas di setiap jenjang pendidikan dan diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Bengkalis berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya penguasaan teknologi oleh siswa serta kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Permasalahan rendahnya penguasaan teknologi serta kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dapat dilihat dari angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,08 persen (SD/MI); 0,28 persen (SMP/MTs); dan 0,38 persen (SMA/SMK/MA) pada tahun 2015 dan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Kabupaten Bengkalis pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan, terutama dari segi kualitas maupun infrastruktur penunjangnya.

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah pokok. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Permasalahan: Masih Rendahnya Daya Saing Pendidikan Bengkalis

Masalah	Akar Permasalahan
Masih rendahnya mutu pendidikan	Masi minimnya sarana pada sekolah
	Rendahnya prestasi sekolah.
	Kurang prestasi siswa baik akademis maupun non akademis
	Masih rendahnya kualitas guru
	Belum meratanya pendistribusian guru

3. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih bahwa Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU
DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Penelaahan terhadap visi tersebut menghasilkan pokok-pokok visi dengan penjelasan sebagai berikut:

- MODEL** : Menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri terdepan dalam penerapan, pengembangan dan pembangunan yang mencerminkan nilai-nilai, karakteristik dan identitas kemelayuan.
- NEGERI**
- MAJU** : Adanya perubahan mendasar pada perilaku kinerja pemerintahan daerah yang ditandai meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, peningkatan terhadap daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi riil dari kondisi periode sebelumnya di Kabupaten Bengkalis ditandai dengan menguatnya kemampuan fiskal daerah yang dapat mendukung peningkatan pembangunan konektivitas antar wilayah, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan percepatan pengembangan kawasan.
- MAKMUR** : Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat, penurunan kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia serta ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 perumusan misinya adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang reformatif, peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pewujudan ide-ide baru gagasan pembangunan baik melalui pendekatan sektoral maupun pendekatan kewilayahan (spatial strength) dengan memperhatikan kekhususan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Misi Kedua : Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi sektoral, pembangunan dan pemberdayaan manusia yang berkualitas dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Misi Ketiga : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Tersedianya prasarana dan sarana konektivitas wilayah dan pemukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek pemanfaatan ruang yang baik, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan potensi masalah lingkungan di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan telaahan visi dan misi RPJMD di atas, misi kedua yaitu: **Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumberdaya manusia untuk kemakmuran rakyat**, merupakan misi yang secara langsung terkait dan sebagai amanat yang harus diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis karena di dalam misi tersebut menyangkut tujuan meningkatnya pembangunan sumberdaya manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan indikator keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; SD/MI/paket A; SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; SMP/MTs/Paket B dan Angka Kelulusan SD/MI; SMP/MTs.

Indikator-indikator dalam RPJMD bidang pendidikan di atas merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mencapainya dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi bupati yang dituangkan dalam RPJMD.

4. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Sasaran strategis Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis tidak lepas dari pembangunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ditujukan untuk lebih menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Sebagai konskuensi keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun Pemerintah Provinsi Riau berkewajiban menambah daya tampung layanan pendidikan menengah. Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban menindaklanjuti penetapan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang implementasinya difokuskan pada; 1). peningkatan layanan peserta didik melalui rintisan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOSM); 2). penyediaan daya tampung pendidikan menengah melalui pembangunan USB, RKB dan rehabilitasi gedung sekolah; 3). penyediaan dan peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau Perguruan Tinggi (PT) dalam penyediaan guru produktif dan pengusulan pengangkatan guru Sekolah Menengah (SM); 4). peningkatan kualitas pembelajaran melalui implementasi kurikulum 2013 yaitu dengan meningkatkan keseimbangan kompetensi *soft skill & hard skill* peserta didik; 5). menyukseskan implementasi Kurikulum 2013, dengan melakukan berbagai kegiatan prioritas yaitu menyiapkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan pendampingan kepada kepala sekolah, guru inti dan pengawas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui LPMP, P4TK, LPPKS, LPTK maupun

Pemerintah Provinsi Riau; penyiapan dan pengadaan buku teks pelajaran yang akan digunakan; serta penguatan sinergi antar pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas perencanaan pendidikan antara Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis serta mendukung pencapaian Visi Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu **“Terwujudnya Layanan Mutu Pendidikan Provinsi Riau yang Berdaya Saing”**.

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, maka misi utama pembangunan Dinas Pendidikan ditetapkan sebagai berikut **“Memecahkan masalah-masalah pendidikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui layanan pendidikan bermutu (ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesesuaian dan kesetaraan) dan penanaman nilai-nilai budaya”**. Secara rinci, misi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau adalah:

1. Peningkatan ketersediaan akses layanan pendidikan melalui pemberian perhatian yang lebih pada daerah 3T (tertinggal, terpencil, terdepan) penduduk miskin dan anak dengan kebutuhan khusus;
2. Peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan melalui pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan serta dengan melakukan investasi secara signifikan untuk jenjang pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan akses yang berkualitas
3. Peningkatan kualitas/mutu, relevansi dan daya saing layanan pendidikan melalui pengembangan dan pelaksanaan standar nasional pendidikan,
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai-nilai budaya.
5. Peningkatan kesetaraan, ketersediaan akses, keterjangkauan, dan kepastian/keterjaminan dalam memperoleh layanan pendidikan, serta peningkatan kualitas dan relevansi melalui pengembangan dan pendayagunaan/pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan
6. Peningkatan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan Pendidikan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
7. Mengupayakan peningkatan pengelolaan manajemen/tata kelola layanan pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien
8. Peningkatan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia.

Visi dan misi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Sasaran tersebut merupakan ukuran keberhasilan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, berikut ini adalah sasaran strategis Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Tabel 3.3
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Kondisi Awal (2013)	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	APK PAUD Provinsi Riau	53,76	55,58	57,40	59,22	61,04	62,88
2.	APS PAUD (0-6) Tahun	13,75	14,25	14,75	15,25	15,75	16,25
3.	Rasio Lembaga PAUD terhadap Penduduk Usia 0 – 6 Tahun	1:170	1:176	1:182	1:188	1:195	1:200
4.	Satu Kab/Kota satu PAUD HI	0	0	2	6	9	12
5.	Rasio guru terhadap murid	1:15	1:15	1:14	1:13	1:12	1:10
6.	Rasio Guru terhadap kelas	1:1,15	1:1,15	1:1,12	1:1,10	1:1,05	1:1
7.	PTK PAUD yang mengikuti diklat kompetensi	24,30%	28,44	32,58	36,72	40,86	45,00
8.	APK SD/SDLB/Paket A	115,2	115,4	115,6	115,8	116,0	116,2
9.	APM SD/SDLB/Paket A	94,13	94,45	94,77	95,09	95,41	95,73
10.	APS SD/SDLB/Paket A (7-12 Tahun)	98,16	98,52	98,88	99,24	99,60	100
11.	Peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,16	0,13	0,09	0,06	0,03	0
12.	Angka Kelulusan SD/MI/SDLB	99,23	99,28	99,33	99,38	99,43	99,50
13.	Angka Nilai Rata-Rata UN SD/MI/SDLB	7,59	7,62	7,65	7,68	7,71	7,75
14.	Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia (7-12 tahun)	1:203	1:203	1:203	1:202	1:201	1:200
15.	Rasio siswa terhadap Guru SD/MI	1:18	1:19	1:21	1:23	1:24	1:25
16.	Rasio siswa terhadap Kelas SD/MI	1:27	1:27	1:28	1:29	1:30	1:30
17.	Rasio Guru terhadap kelas SD/MI	0,69:1	0,75:1	0,81:1	0,87:1	0,93:1	1:1
18.	Lulusan SD/MI/SDLB yang melanjutkan pendidikan	76,19	80,95	85,71	90,47	95,23	100
19.	SD/SDLB yang menerapkan kurikulum 2013	0	13	26	39	52	65
20.	SD/MI/SDLB yang berakreditasi	22,57	28,05	33,53	39,01	44,49	50
21.	SD/MI/SDLB yang memenuhi SPM	0	18	36	54	72	90
22.	Guru SD/MI/SDLB berkualifikasi Akademik S1/D4	47,01	47,60	48,19	48,78	49,37	50
23.	APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	106,24	106,7	107,24	107,5	107,8	108,14
24.	APM SMP/MTs/	83,08	85,61	88,14	90,67	93,20	95,73

	SMPLB/Paket B						
25.	APS SMP/MTs/ SMPLB/Paket B (13-15 Tahun)	87,95	90,08	92,21	94,34	96,47	98,61
26.	Peserta didik SMP/MTs/ SMPLB putus sekolah	0,21	0,16	0,12	0,08	0,04	0
27.	Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	99,23	99,28	99,33	99,38	99,43	99,50
28.	Angka Nilai Rata-Rata SMP/MTs/SMPLB	6,93	7,04	7,15	7,26	7,37	7,50
29.	Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia (13-15 tahun)	1:300	1:280	1:260	1:240	1:220	1:200
30.	Rasio Guru terhadap siswa SMP/MTs	1:16	1:17,8	1:19,6	1:21,4	1:23,2	1:25
31.	Rasio siswa terhadap Kelas SMP/MTs	1:36	1:35,2	1:34,4	1:33,6	1:32,8	1:32
32.	Rasio Guru terhadap kelas SMP/MTs	0,44:1	0,55:1	0,66:1	0,77:1	0,88:1	1:1
33.	Lulusan SMP/MTs/ SMPLB/Paket B yang melanjutkan pendidikan	96,12	96,89	97,66	98,43	99,2	100
34.	SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013	0	13	26	39	52	65
35.	SMP/MTs yang berakreditasi	18,77	25,01	31,25	37,49	43,73	50
36.	SMP/MTs yang memenuhi SPM	0	18	36	54	72	90
37.	Guru SMP/MTs berkualifikasi Akademik S1/D4	78,33	78,66	78,99	79,32	79,65	80
38.	total medali yang diperoleh dari kompetisi tingkat pendidikan dasar	24	29,2	34,4	39,6	44,8	50
39.	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	90,84	91,35	91,85	92,37	92,87	93,41
40.	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	67,82	68,34	68,86	69,38	69,90	70,43
41.	APS SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (16-18)	66,20	67,45	68,70	69,95	71,20	72,45
42.	Angka Putus Sekolah	0,34	0,27	0,20	0,13	0,07	0
43.	Angka Kelulusan	99,59	99,62	99,65	99,68	99,71	99,75
44.	Angka Rata-Rata UN	7,57	7,60	7,64	7,68	7,71	7,75
45.	Rasio Siswa terhadap Guru SMA/MA/SMK	1:18	1:18,6	1:19,2	1:19,8	1:20,4	1:21
46.	Rasio Siswa Terhadap Kelas SMA/MA/SMK	1:30	1:30,4	1:40,8	1:31,2	1:31,6	1:32
47.	Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK	0,44:1	0,55:1	0,66:1	0,77:1	0,88:1	1:1
48.	SMA/MA/SMK yang	0	15	30	35	45	75

	menerapkan kurikulum 2013						
49.	SMA/MA/SMK yang berakreditasi	92,41	92,92	93,43	93,94	94,45	95
50.	SMA/MA/SMK yang memenuhi SPM	0	18	36	54	72	90
51.	Guru SMA/MA/SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	92,64	93,11	93,58	94,05	94,52	95
52.	total medali yang diperoleh dari kompetisi tingkat pendidikan menengah	4	5	6	8	9	10
53.	APK SD/SDLB/Paket A	115,2	115,4	115,6	115,8	116,0	116,2
54.	APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	106,24	106,7	107,2	107,5	107,8	108,14
55.	APM SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C	67,82	68,34	68,86	69,38	69,90	70,43
56.	Jumlah sekolah terpadu di kab/kota	0	0	1	1	2	3
57.	APK PT dan PTA Usia 19-23 tahun	25,73	28,58	31,43	34,28	37,13	40
58.	Mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	13,92	15,13	16,34	17,55	18,76	20
59.	Angka Melek Huruf	98,45	98,48	98,51	98,54	98,57	98,60
60.	Anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	0	10	20	30	40	50
61.	Lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B	41,17	42,93	44,69	46,45	48,21	50
62.	PTK nonformal dan informal yang mengikuti peningkatan kompetensi	50	54	58	62	66	70
63.	kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	25	38	51	64	77	90
64.	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang terinventarisir/terdata	0	2	4	7	9	12
65.	Jumlah karya seni budaya yang diinventarisir dan didaftarkan ke HAKI	0	10	20	30	40	50
66.	Jumlah Upacara Adat Melayu yang didokumentasikan	0	2	4	7	9	12
67.	Jumlah event dan kegiatan	0	7	14	21	28	35

	berkesenian di Taman Budaya						
68.	Jumlah Komunitas Budaya yang di fasilitasi	0	6	12	18	24	30
69.	Cagar budaya yang dilestarikan/terdaftar	25	40	55	70	85	100
70.	Jumlah buku sejarah lokal yang bicetak	0	500	1000	1500	2000	2500
71.	Jumlah frekwensi promosi dan misi kebudayaan yang dilaksanakan	0	3	6	9	12	15
72.	Persentase sekolah yang melaksanakan MBS dengan baik	0	10	20	30	40	50
73.	Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang kurangnya 79	47,76	51,16	54,61	58,06	61,51	65
75.	Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya	98	98,00	98,50	99,00	99,5	100

5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD dan telaah terhadap visi dan misi bupati maka isu-isu strategis di lingkungan Dinas Pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

6.1 Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Sumber daya manusia merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Pada akhir tahun 2015, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai dilaksanakan sebagai bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan meningkatnya daya saing manusia antarnegara di dalam pelaksanaan MEA menyebabkan persaingan akan kualitas, dan kompetensi sangat dibutuhkan bagi SDM Indonesia. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Bengkalis berperan di berbagai sektor penting dalam peningkatan kesejahteraan.

6.2 Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu tantangan atas peluang yang sangat menjanjikan jika mampu dimanfaatkan dengan optimal. Pada kondisi dimana penduduk dengan usia produktif yang sangat besar, sementara pada sisi lain jumlah usia muda semakin kecil, dan penduduk usia lanjut dengan populasi yang belum terlalu besar.

Bonus demografi akan diikuti dengan dampak social maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yakni angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non produktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Peluang bonus demografi ini diharapkan jumlah penduduk produktif tidak banyak menanggung beban atas penduduk yang tidak produktif, dan dalam perspektif akhirnya selisih jumlah subsidi yang semakin kecil akan memberikan dampak kemandirian secara ekonomis yang mampu dimanfaatkan untuk sektor lain.

Jumlah penduduk usia kerja yang melimpah pada kurun waktu terjadinya bonus demografi (2020-2030) sangat potensial memberikan dampak positif sebagai modal pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya hasil ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas.

Uraian tersebut diatas akan menjadi terbalik dan merupakan bencana bagi Negara manakala bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan sebagai peluang, karena jumlah penduduk yang besar dan dalam usia produktif namun tidak mampu terserap dalam dunia kerja akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kompetensi. Hal yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi tersebut adalah memberdayakan semua potensi yang ada, mempersiapkan rencana pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung penduduk usia produktif pada saat terjadinya bonus demografi tersebut.

Guna menyongsong terjadinya bonus demografi tersebut, pendidikan menjadi sangat prioritas untuk menjadi garapan utama guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kegagalan menyiapkan sumber daya yang unggul akan berakibat munculnya musibah pada situasi yang seharusnya menjadi berkah. Bonus demografi yang diperkirakan akan tersedianya jumlah penduduk usia produktif dan diperkirakan sebesar 70% dari jumlah penduduk usia produktif ditahun 2020-2030 harus disikapi sebagai sebuah peluang emas untuk menjadikan Negara ini mampu menjadi kekuatan ekonomi, dan hal yang harus dipersiapkan adalah penyediaan lapangan kerjadan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kata kunci untuk menyambut era bonus demografi dengan kesadaran bahwa pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang dan sebagai instrument utama kemajuan bangsa harus menjadi prioritas pembangunan.

6.3 Belum Optimalnya Pembinaan Pendidikan Karakter

Berdasarkan tayangan media massa pada akhir-akhir ini, sering dipertontonkan perilaku menyimpang oleh para pelajar kita, diantaranya: tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang dan lain-lain, sungguh sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak kita mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik khususnya pada tingkat PAUD/pendidikan nonformal, tingkat SD, SMP di Kabupaten Bengkalis.

6.4 Pergeseran Kewenangan Pendidikan Menengah dari Kabupaten ke Provinsi

Terdapatnya pergeseran kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan kinerja pelayanan dan perluasan akses pada jenjang menengah baik pada sekolah menengah umum dan kejuruan bergantung kepada arah kebijakan dan prioritas anggaran pembangunan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik oleh provinsi di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hal ini mengakibatkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak mempunyai intervensi secara langsung untuk peningkatan kualitas pendidikan menengah atas. Peningkatan koordinasi yang intensif antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis khususnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar dapat memperhatikan kualitas pendidikan menengah khususnya Kabupaten Bengkalis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Visi adalah keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta setting/posisi daerah dimasa depan. Rencana strategis memerlukan fokus atau visi sehingga hasil akhir yang diharapkan dapat terwujud. Visi bisa juga diartikan sebagai tujuan, pandangan dan cita-cita kedepan agar organisasi ini dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mampu menggiring arah pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perumusan visi didasarkan atas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Untuk mendukung visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskanlah Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis adalah : ***“Terwujudnya Pendidikan Berdaya Saing Menuju Bengkalis Maju dan Makmur”***.

Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis:

1. Meningkatkan kualitas Akses Pendidikan;
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak;
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan pendidikan.

IV.2. Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan dan visi, misi dan program Bupati terpilih. Penetapan tujuan dan sasaran perlu

mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan selama kurun waktu lima tahun kedepan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 - 2021. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

IV.2.1. Tujuan.

Penentuan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan, visi, misi dan program Bupati terpilih. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi Prasarana Pendidikan.

Prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Prasarana yang baik menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru maupun peserta didik untuk berada di sekolah dalam menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Tanpa didukung Prasarana yang memadai, proses pendidikan tentunya akan mengurangi efektifitas pembelajaran bahkan hal terburuk yang bisa terjadi tanpa dukungan Prasarana yang tepat maupun memadai proses pendidikan akan tersendat bahkan bisa saja terhenti secara total. Seorang guru yang berkompeten tanpa didukung oleh Prasarana yang baik tidak akan bisa mentransfer pengetahuan/ pembelajaran secara maksimal. Tujuan ini mengandung sasaran meningkatnya pemerataan akses Prasarana pendidikan.

Adapun program yang telah dijalankan oleh dinas pendidikan sehubungan dengan penyediaan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut : Pembangunan Gedung Sekolah, Rehabilitasi Sekolah, Pembangunan Ruang majelis Guru, Pembangunan Rumah Dinas Guru, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir, Pengadaan Meubiler Sekolah, Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah,.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

Kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana lembaga pendidikan tersebut telah mencapai suatu keberhasilan, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi Negara dan bangsa Indonesia, sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berarti dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal. Sekolah berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dari anak didik, apa lagi dengan kondisi yang seperti sekarang, yaitu untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, tentu saja sekolah menjadi ujung tombak dan mempunyai peran yang sangat strategis. Melalui bidang pengajaran, sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik memiliki keahlian untuk bekerja dan ikut membangun bangsa dan Negara.

Mutu Pendidikan juga dilihat dari meningkatnya pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai humanism yang meliputi keteguhan dan ketakwaan serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan kepada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui penguatan dan peningkatan mutu pendidikan, Peningkatan mutu tenaga Kependidikan, Penguatan substansi pendidikan. Tujuan ini mengandung sasaran meningkatnya prestasi dan mutu peserta didik serta tenaga pendidik. Untuk mencapai maksud tersebut, yang harus diwujudkan adalah:

- **Meningkatnya Angka Kelulusan** dengan capaian indikator pembangunan yakni **Angka Kelulusan** menjadi **100 persen**.
- **Menurunnya angka putus sekolah** dengan capaian indikator pembangunan yakni **Angka Putus Sekolah SD/MI** menjadi **0 persen**; **Angka Putus Sekolah SMP/MTs** menjadi **0,0 persen**.
- **Meningkatnya kesadaran masyarakat yang memiliki anak-anak yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi** dengan capaian indikator pembangunan yakni **Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs** sebesar **100 persen**.
- **Meningkatnya prestasi siswa** dengan capaian indikator pembangunan meningkatnya **jumlah siswa yang mengikuti kompetensi tingkat provinsi dan atau nasional**.
- **Menurunnya tingkat kenakalan peserta didik**.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) adalah salah satu faktor kunci peningkatan mutu pendidikan dan sekaligus menjadi bagian dari program peningkatan mutu itu sendiri, sehingga peningkatan mutu PTK khususnya standar pendidikan akademik minimum, mutlak dilakukan. Oleh karena banyaknya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi maka perlu ada dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersinergi.

Tujuan ini mengandung sasaran meningkatnya kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualifikasi pendidikan minimum guru dan guru yang sudah memenuhi standar pendidikan akademik minimum pun, tidak merupakan jaminan meningkatnya kemampuan profesi yang bersifat substansi pelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada anak didik.

Oleh karena itu baik bagi yang belum memenuhi standar maupun yang telah memenuhi harus diupayakan mengikuti program peningkatan kompetensi secara intensif, apabila mutu pendidikan mau ditingkatkan. Sedangkan Pemerintah wajib memfasilitasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini;

1. Fasilitasi Kegiatan KKG/MGMP
2. Sertifikasi Pendidik
3. Uji kompetensi lokal guru secara priodik
4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Sekolah Negeri dan Swasta

3. Tercapainya Tata Pelayanan Pendidikan yang Baik.

Bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang profesional, baik pada tingkat kabupaten maupun pada satuan pendidikan sehingga pengelolaan pendidikan semakin efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan pengelolaan yang demokratis dalam penerapan otonomi pendidikan yang lebih luas untuk mencapai kemandirian. Pengelolaan pendidikan yang profesional dalam arti efisien, akuntabel dan mampu melaksanakan proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan, baik pada tingkat Kabupaten Bengkalis maupun pada tingkat satuan unit kerja disetiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Tujuan ini mengandung sasaran meningkatnya kinerja pembinaan terhadap pengembangan pendidikan.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Siswa Terhadap Kelas 2. Persentase ketersediaan sarana disekolah 3. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk 4. Persentase sekolah yang layak dan baik
Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya dan Terjamin Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kelulusan 2. Angka melanjutkan sekolah 3. Angka putus sekolah (APS) 4. Indeks Prestasi Siswa 5. Persentase menurunnya kenakalan siswa
	Meningkatnya Mutu Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Guru yang memenuhi kompetensi 2. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi 3. Rasio Guru terhadap siswa
Tercapainya tata pelayanan pendidikan yang baik	Meningkatnya kinerja pembinaan terhadap pengembangan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuntasan pelayanan dasar pendidikan 2. Ketersediaan laporan kinerja

		dan laporan keuangan
--	--	----------------------

4.3. Strategi dan Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dilakukan melalui tahapan analisis potensi, kesempatan, hambatan, dan tantangan. Analisis yang dilakukan menghasilkan rumusan-rumusan sebagai dasar analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Setelah perumusan strategi seperti dijelaskan di atas, kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan yang lebih rinci. Kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran setiap tahapan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Keterkaitan strategi dan kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pendidikan dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Usia Dini, dengan arah kebijakan Melaksanakan Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendidikan Usia Dini;
2. Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan arah kebijakan Melaksanakan Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Pengembangan Mutu Pembelajaran Prestasi Sekolah, dengan arah kebijakan Melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada semua Jenjang Sesuai dengan Kewenangannya;
4. Pembentukan Karakter Peserta Didik, dengan arah kebijakan Meningkatkan Karakter Peserta Didik
5. Pelaksanaan Pemenuhan dan Kualitas Tenaga Pendidik, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi.
 - b. Melaksanakan Pemerataan Tenaga Pendidik.

6. Melaksanakan Pembinaan Pelayanan Administrasi Pendidikan, dengan arah kebijakan Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Pendidikan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KELOMPOK SASARAN

Pada bagian ini dipaparkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis selama lima tahun (2016 – 2021) yang dituangkan dalam matrik renstra sebagaimana tertuang dalam table 5.1. berikut:

Tabel 5.1
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016 - 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA																
						2016		2017		2018		2019		2020		2021						
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
Memenuhi sarana dan prasarana	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan	- Rasio Siswa Terhadap Kelas - Persentase ketersediaan sarana disekolah - Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk - Persentase sekolah yang layak dan baik	Program Pendidikan Anak Usia Dini																			
			Pembangunan gedung sekolah	Jumlah USB Pendidikan Anak Usia Dini Yang dibangun	4	-	-	-	3 Sekolah	6.773.693.950	5 Sekolah	10.000.000.000	1 Kegiatan	12.500.000.000	1 Kegiatan	15.000.000.000						
			Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah sekolah yang dibangun lapangan upacara, halaman dan tempat parkir					8 Kec	130.000.000	1 Kab	175.000.000	1 Kab	200.000.000	1 Kab	250.000.000						
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sekolah TK yang dibangun MCK					4 Sekolah	663.946.000	4 Sekolah	670.000.000	1 Kab	700.000.000	1 Kab	735.000.000						
			Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah meubiler guru dan siswa yang diadakan	0				11 Kec	511.506.700	11 Kec	550.000.000	1 Kab	600.000.000	1 Kab	650.000.000						
			Pemberian Makanan Tambahan untuk anak pra sekolah	Jumlah anak pra sekolah Lembaga PAUD yang diberi makanan tambahan				3500 Anak	500.000.000	3500 Anak	1.445.900.000	3500 Anak	1.551.500.000	1 Kab	1.575.500.000	1 Kab	1.585.000.000					
			Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Yang Tersedia					4 Sekolah	200.000.000	4 Sekolah	210.463.000	4 Sekolah	230.000.000	1 Kab	250.000.000	1 Kab	275.000.000				
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang dilakukan rehab	0			4 Sekolah	862.000.000	4 Sekolah	1.567.591.600	4 Sekolah	1.600.000.000	1 Kab	1.625.000.000	1 Kab	1.650.000.000					
			Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD (TK/KB/SPS/TPA/TAM)	Jumlah sekolah yang dibangun pagar				50 Sekolah	10.148.563.300		3.500.000.000		3.745.000.000	1 Kab	3.950.000.000	1 Kab	4.000.000.000					
			Pengadaan alat praktek dan peraga siswa						1 Kab	550.000.000	1 Kab	600.000.000	1 Kab	650.000.000	1 Kab	700.000.000						
			Pengadaan Buku Penunjang Pembelajaran Jenjang PAUD						1 Kab	150.000.000	1 Kab	200.000.000	1 Kab	250.000.000	1 Kab	300.000.000						
			Pengadaan Sarana Pembelajaran Bagi KBM pada Lembaga PKBM Kabupaten Bengkulu						1 Kab	100.000.000	1 Kab	150.000.000	1 Kab	200.000.000	1 Kab	250.000.000						
			Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat						1 Kab	450.000.000	1 Kab	500.000.000	1 Kab	600.000.000	1 Kab	650.000.000						
			Pengadaan APE Dalam dan Luar TK Kabupaten Bengkulu						1 Kab	300.000.000	1 Kab	350.000.000	1 Kab	450.000.000	1 Kab	500.000.000						
			Bantuan Gedung, MCK, Meubilier, Jaringan PLN dan Pagar sekolah TK Kabupaten Bengkulu						1 Kab	450.000.000	1 Kab	500.000.000	1 Kab	550.000.000	1 Kab	600.000.000						
			Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF						1 Kab	200.000.000	1 Kab	250.000.000	1 Kab	300.000.000	1 Kab	350.000.000						
			Pelatihan Pengelola Bagi Guru PAUD						1 Kab	300.000.000	1 Kab	350.000.000	1 Kab	400.000.000	1 Kab	450.000.000						
			Pembebasan Lahan untuk Pembangunan TK Kabupaten Bengkulu						1 Kab	1.800.000.000	1 Kab	2.000.000.000	1 Kab	2.300.000.000	1 Kab	2.500.000.000						
			Program Pendidikan dasar sembilan tahun																			
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD sederajat	Jumlah ruang kelas yang dibangun				7 Sekolah	5.711.413.900	13 Sekolah	7.055.000.000	26 Sekolah	17.239.528.000	26 Sekolah	18.468.914.760	1 Kab	20.000.000.000	1 Kab	22.500.000.000			
Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP sederajat	Jumlah ruang kelas yang dibangun				1 Sekolah	564.706.000	7 Sekolah	10.365.000.000	31 RKB	9.183.740.600	31 RKB	9.826.602.442	1 Kab	10.000.000.000	1 Kab	11.500.000.000						

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Targ	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat	Jumlah gedung yang dilakukan rehab sedang/berat	1 Kab	15 Sekolah	3.340.065.800	26 Sekolah	6.511.630.300	35 Sekolah	17.000.000.000	35 Sekolah	18.190.000.000	1 Kab	18.500.000.000	1 Kab	19.000.000.000
			Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMP sederajat	Jumlah gedung yang dilakukan rehab sedang/berat	1 Kab	2 Sekolah	400.000.000	17 Sekolah	3.555.000.000	8 Sekolah	2.339.999.900	8 Sekolah	2.503.799.893	1 Kab	2.655.500.000	1 Kab	3.000.000.000
			Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajat	Jumlah mebeleur SD yang diadakan		1 Keg	2.980.000.000	50 Sekolah	5.999.950.000	20 Sekolah	2.975.360.000	20 Sekolah	3.210.000.000	1 Kab	3.250.000.000	1 Kab	3.500.000.000
			Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajat	Jumlah mebeleur SMP yang diadakan	1 Kab	1 Keg	1.449.500.000	50 Sekolah	1.500.000.000	20 Sekolah	2.340.000.000	20 Sekolah	2.503.800.000	1 Kab	2.755.000.000	1 Kab	3.000.000.000
			Penyediaan Prasarana/ Sarana Penunjang SD sederajat	Jumlah SD yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya				50 Sekolah	24.356.234.000	51 Sekolah	10.984.600.000	51 Sekolah	11.770.000.000	1 Kab	12.000.000.000	1 Kab	12.500.000.000
			Penyediaan Prasarana/ Sarana Penunjang SMP sederajat	Jumlah SMP yang mendapatkan prasarana/sarana penunjang setiap tahunnya				20 Sekolah	5.887.219.800	23 Sekolah	5.691.788.500	23 Sekolah	6.090.213.695	1 Kab	6.100.000.000	1 Kab	6.250.000.000
			Pembangunan Gedung Sekolah SD sederajat	Jumlah USB SD yang dibangun			3.410.351.400		3.948.902.900	1 Keg	1.000.000.000	1 Keg	1.200.000.000	1 Keg	2.500.000.000	1 Keg	3.500.000.000
			Pembangunan Gedung Sekolah SMP sederajat	Jumlah USB SMP yang dibangun		3 Sekolah	7.002.400.000	1 Sekolah	500.000.000	4 Sekolah	8.034.000.000	4 Sekolah	8.596.380.000	1 Kab	8.750.000.000	1 Kab	9.000.000.000
			Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat	Jumlah ruang ibadah yang dibangun		4 Sekolah	800.000.000	1 Sekolah	200.000.000	11 Sekolah	2.986.000.000	11 Sekolah	3.210.000.000	1 Kab	3.500.000.000	1 Kab	3.750.000.000
			Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat	Jumlah ruang ibadah yang dibangun		1 Sekolah	244.000.000	3 Sekolah	600.000.000	6 Sekolah	1.750.000.000	6 Sekolah	1.870.000.000	1 Kab	1.950.000.000	1 Kab	2.000.000.000
			Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD sederajat	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun				2 Sekolah	400.000.000	18 Sekolah	3.700.000.000	18 Sekolah	3.959.000.000	1 Kab	4.000.000.000	1 Kab	4.200.000.000
			Penambahan Ruang Guru SMP sederajat	Jumlah ruang majelis guru yang dibangun						5 Sekolah	995.592.500	5 Sekolah	1.065.283.975	1 Kab	1.250.000.000	1 Kab	1.500.000.000
			Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang dibangun		11 Unit	1.094.500.000	15 Sekolah	1.955.315.000	40 Sekolah	4.195.040.000	40 Sekolah	4.617.050.000	1 Kab	4.750.000.000	1 Kab	5.000.000.000
			Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary SD sederajat	Jumlah MCK yang dilakukan rehab berat/ sedang							210.567.500		350.567.500	1 Kab	375.000.000		400.000.000
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP sederajat	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang dibangun		6 Unit	510.000.000	4 Sekolah	734.746.200	2 Sekolah	350.567.500	2 Sekolah	375.107.225	1 Kab	400.000.000	1 Kab	425.000.000
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga yang dibangun	2 Keg					9 Sekolah	2.600.000.000	9 Sekolah	2.782.000.000	1 Kab	3.000.000.000	1 Kab	3.250.000.000
			Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga yang dilakukan rehab sedang/berat							125.000.000		150.000.000		175.000.000		250.000.000
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SMP sederajat	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga yang dibangun		2 Sekolah	871.610.500			5 Sekolah	1.006.152.500	5 Sekolah	1.076.583.175	1 Kab	1.150.000.000	1 Kab	1.255.000.000
			Pembangunan Perpustakaan SD sederajat	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1 Sekolah					13 Sekolah	2.882.397.500	13 Sekolah	3.210.000.000	1 Kab	3.500.000.000	1 Kab	3.750.000.000
			Pembangunan Perpustakaan SMP sederajat	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun						2 Sekolah	682.473.300	2 Sekolah	730.246.431	1 Kab	750.000.000	1 Kab	800.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat	Jumlah Sekolah yang dibangun ruang labor setiap tahunnya			2 Sekolah	812.000.000	5 Sekolah	2.292.559.300	5 Sekolah	2.453.038.451	1 Kab	2.500.000.000	1 Kab	2.750.000.000	
			Rehabilitasi Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP sederajat	Jumlah ruang laboratorium dan praktikum yang dilakukan rehab berat/ sedang	2 Sekolah	1 Sekolah	258.000.000	1 Sekolah	200.000.000	2 Sekolah	459.854.900	2 Sekolah	494.125.893	1 Kab	500.000.000	1 Kab	700.000.000
			Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD sederajat	Jumlah SD yang dibangun lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	4 Sekolah	3 Sekolah	565.000.000	69 Sekolah	13.800.000.000	37 Sekolah	7.679.447.000	37 Sekolah	8.346.000.000	1 Kab	8.500.000.000	1 Kab	8.700.000.000
			Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP sederajat	Jumlah SMP yang dibangun lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun		3 Sekolah	394.000.000	4 Sekolah	1.350.000.000	8 Sekolah	1.693.048.300	8 Sekolah	1.811.561.681	1 Kab	2.000.000.000	1 Kab	2.500.000.000
			Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga siswa SD sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana olahraga/kesenian setiap tahunnya						20 Sekolah	2.500.000.000	20 Sekolah	20.700.000.000	1 Kab	21.000.000.000	1 Kab	21.500.000.000
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP sederajat	Kelompok Jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya						2 Jenis	2.055.500.000	2 Jenis	2.700.000.000	1 Kab	3.000.000.000	1 Kab	3.200.000.000
			Penyediaan buku penunjang SD sederajat	Tersedianya Buku penunjang Budi Pekerti untuk SD/MI						336 Paket	331.160.000	336 Paket	342.400.000	1 Kab	350.000.000	1 Kab	400.000.000
			Penyediaan Buku Penunjang SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan Pengadaan Buku Penunjang Penumbuhan Budi Pekerti SMP setiap tahunnya						98 Sekolah	390.000.000	98 Sekolah	417.300.000	1 Kab	450.000.000	1 Kab	500.000.000
			Pemberian Makanan Tambahan untuk murid pendidikan dasar	Jumlah murid yang mendapatkan PMT setiap tahunnya			6000 Siswa	2.500.000.000	86000 Siswa SD	8.247.200.000	86000 Siswa SD	8.827.500.000	1 Kab	9.000.000.000	1 Kab	9.150.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif	Jumlah SMP sederajat yang mendapatkan pengadaan setiap tahunnya.						10 Sekolah	1.794.000.000	10 Sekolah	1.919.580.000	1 Kab	2.000.000.000	1 Kab	2.245.000.000
			Pengadaan Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif							8 Sekolah	1.170.000.000	8 Sekolah	1.251.900.000	1 Kab	1.500.000.000	1 Kab	1.750.000.000
			Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK	Tersedianya Komputer untuk pelaksanaan UNBK						91 Sekolah	23.184.000.000	91 Sekolah	24.806.880.000	1 Kab	25.000.000.000	1 Kab	25.250.000.000
			Peningkatan Sarana Prasarana SMP Pintar	Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi SMP unggulan daerah						5 Sekolah	2.339.986.800	5 Sekolah	2.503.800.000	1 Kab	2.753.000.000	1 Kab	2.935.000.000
			Peningkatan Sarana Prasarana SMP Unggulan				3.200.000.000	10 Sekolah	1.794.000.000	10 Sekolah	1.919.580.000	1 Kab	2.000.000.000	1 Kab	2.245.000.000	1 Kab	2.245.000.000
			Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat SMP	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya	100%	1 Kab	9.137.051.100	13 Jenis	27.650.000.000	4 Jenis	1.700.000.000	4 Jenis	1.819.000.000	1 Kab	2.000.000.000	1 Kab	2.250.000.000
			Pengadaan Buku Penunjang SMP sederajat	Jumlah sekolah yang mendapatkan Pengadaan Buku Penunjang Penumbuhan Budi Pekerti SMP setiap tahunnya						98 Sekolah	390.000.000	98 Sekolah	417.300.000	1 Kab	450.000.000	1 Kab	500.000.000
			Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Kelompok jenis sarana yang diberikan kepada SD setiap tahunnya	100%	1 Kab	8.867.551.100	10 Jenis	21.666.000.000	1 Keg	3.500.000.000	1 Keg	3.500.000.000	1 Keg	4.000.000.000	1 Keg	4.300.000.000
			Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer untuk pelaksanaan UNBK						91 Sekolah	23.184.000.000	91 Sekolah	24.806.880.000	1 Kab	25.000.000.000	1 Kab	25.250.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP sederajat	Kelompok Jenis sarana yang diberikan kepada SMP setiap tahunnya						2 Jenis	2.055.500.000	2 Jenis	2.700.000.000	1 Kab	3.000.000.000	1 Kab	3.200.000.000
			Pengadaan Alat UKS SD sederajat	Jumlah alat UKS SD yang diadakan setiap tahunnya						1 Kab	1.800.000.000	1 Kab	2.000.000.000	1 Kab	2.300.000.000	1 Kab	2.500.000.000
			Program Non Formal														
			Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal	Terlaksana Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal				1 Lembaga	100.000.000	100%	300.000.000	100%	321.000.000	100%	335.000.000	100%	350.000.000
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan														
			Perencanaan Prasarana Fisik		1 Keg	1 Keg	2.000.000.000	24 Dokumen	1.000.000.000	1 Kab	1.000.000.000	1 Kab	1.200.000.000	1 Kab	1.200.000.000	1 Kab	1.500.000.000
Meningkatkan kualitas pendidikan	- Meningkatkan mutu pendidikan - Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Angka Kelulusan - Angka Melanjutkan Sekolah - Angka Putus Sekolah (APS) - Indek Prestasi siswa - Jumlah sekolah yang berprestasi - Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik - Persentase Guru yang memenuhi kompetensi - Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi - Rasio Guru Terhadap siswa	Program Pendidikan Anak Usia Dini														
			Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Karakter						100 Orang	239.271.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	315.250.000	100 Orang	324.500.000
			Pelatihan Implementasi Kurikulum PAUD (TK, KB, TPA, dan SPS)	Jumlah PAUD yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	120 Orang	200 Orang	511.341.000			1 Kegiatan	280.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	350.000.000	1 Kegiatan	400.000.000
			Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya pembinaan terhadap PAUD	75 Orang	75 Orang	677.514.000										
			Penyelenggaraan lomba kreativitas anak- anak TK	Jumlah anak prasekolah yang berpartisipasi pada lomba setiap tahunnya			321.274.000	5 Cabang	299.250.000	5 Cabang	394.264.000	5 Cabang	400.000.000	1 Kab	425.000.000	1 Kab	450.000.000
			Pelaksanaan Jambore PAUD	Jumlah anak prasekolah yang berpartisipasi pada jambore setiap tahunnya			119.817.600	160 Orang	589.190.300	160 Orang	896.823.300	160 Orang	900.000.000	1 Kab	915.000.000	1 Kab	925.000.000
			Penyaluran dana untuk TK Negeri	Jumlah TK Negeri yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya			497.548.400	4 Sekolah	1.248.360.000	4 Sekolah	1.185.860.000	4 Sekolah	1.300.000.000	1 Kab	1.325.000.000	1 Kab	1.345.000.000
			Penyaluran dana untuk TK Swasta	Jumlah TK Swasta yang mendapatkan dana operasional setiap tahunnya			2.000.000.000	173 Sekolah	146.118.500								
			Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik	Jumlah PAUD yang dijadikan model terintegrasi dengan POSYANDU dan KB dalam satu tahun				4 PAUD	400.000.000	4 PAUD	500.000.000	4 PAUD	535.000.000	1 Kab	550.000.000	1 Kab	565.000.000
			Pembentukan Pilot Project PAUD Komunitas Adat Terpencil	Jumlah kelompok yang dijadikan model khusus pendidikan pra sekolah berwawasan kearifan lokal lingkup KAT				4 Kelompok	200.000.000	4 Kelompok	700.000.000	4 Kelompok	749.000.000	1 Kab	750.000.000	1 Kab	760.000.000
			Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra (IGTK, GOPTKI, HIMPAUDI dan FORUM PAUD)	Terlaksananya pemberdayaan organisasi mitra dalam satu tahun				4 Lembaga	499.520.500	4 Lembaga	750.000.000	1 Keg	800.000.000	1 Keg	825.000.000	1 Keg	850.000.000
			Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini	Jumlah Anak Pra Sekolah yang berpartisipasi pada Hari Anak Nasional				8 Kec	200.000.000	5 Kegiatan	295.586.000	5 Kegiatan	374.500.000	1 Kab	380.500.000	1 Kab	400.000.000
			Akreditasi kelembagaan PAUD								75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000
			Monitoring Evaluasi dan pelaporan PAUDNI	Jumlah sekolah yang dikunjungi			148.000.000		148.000.000	8 Kecamatan	275.000.000	8 Kecamatan	300.000.000	8 Kecamatan	350.000.000	8 Kecamatan	375.000.000
			Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUD dan PNF	Jumlah Peserta yang mengikuti apresiasi dan kreasi PAUD dan PNF						1 Kegiatan	450.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	550.000.000	1 Kegiatan	600.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Program Pendidikan dasar sembilan tahun														
			Penyelenggaraan ujian nasional SMP sederajat	Jumlah sekolah SMP/MTs yang mengikuti ujian nasional setiap tahunnya	137 Sekolah	8 Kec	800.000.000	149 Sekolah	1.159.671.850	150 Sekolah	1.080.204.500	150 Sekolah	1.284.000.000	150 Sekolah	1.350.000.000	150 Sekolah	1.400.000.000
			Penyelenggaraan Ujian Nasional SD sederajat	Jumlah peserta ujian nasional SD	340 Sekolah	1 Keg	962.928.000	358 Sekolah	1.554.035.600	13000 Siswa	1.550.168.600	13000 Siswa	1.664.744.092	1 Keg	1.750.000.000	1 Keg	1.850.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Guru "one day one ayat" Sekolah Dasar se Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan One Day One Ayat						401 Orang	377.379.000	401 Orang	428.000.000	1 Keg	450.000.000	1 Keg	465.000.000
			Workshop menyusun bahan ajar muatan lokal guru SD se-Kabupaten Bengkalis	Jumlah guru yang mengikuti workshop penyusunan bahan ajar muatan lokal						336 Sekolah	259.808.000	336 Sekolah	309.595.940	1 Keg	320.500.000	1 Keg	345.000.000
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan pelaksanaan kurikulum						1 Keg	450.000.000	1 Keg	450.000.000	1 Keg	475.000.000	1 Keg	485.000.000
			Workshop menyusun bahan ajar bagi guru mata pelajaran SD	Jumlah peserta workshop bahan ajar bahasa dan sastra daerah bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia						336 Sekolah	290.296.000	336 Sekolah	300.000.000	1 Keg	324.550.000	1 Keg	355.250.000
			Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah KKG yang dilakukan pembinaan						78 Gugus	584.793.000	78 Gugus	625.950.000	1 Keg	630.000.000	1 Keg	685.000.000
			Sosialisasi Pengelola UKS Tingkat SD sederajat	Jumlah KKG yang dilakukan pembinaan						78 Gugus	584.793.000	78 Gugus	625.950.000	1 Keg	630.000.000	1 Keg	685.000.000
			Sosialisasi penumbuhan budi pekerti Kepala Sekolah dan Guru SD sederajat	Jumlah guru yang diberikan sosialisasi penumbuhan budi pekerti						100 Orang	300.000.000	100 Orang	320.000.000	1 Keg	350.000.000	1 Keg	365.000.000
			Pemantauan dan Evaluasi penggunaan dana BOS dan BOSDA SD	Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dana BOS dan BOSDA SD			4 Kali	321.281.000	336 Sekolah	247.673.000	336 Sekolah	267.500.000	1 Keg	275.000.000	1 Keg	300.000.000	
			Penyelenggaraan akreditasi SD	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan dan penilaian Akreditasi						50 Sekolah	102.300.000	50 Sekolah	300.000.000	1 Kab	325.000.000	1 Kab	350.000.000
			Sosialisasi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan SD	Jumlah guru BK yang diberikan sosialisasi						100 Orang	150.000.000	100 Orang	160.500.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	225.000.000
			Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya	985 Orang	72 Orang	244.600.000	20 Sekolah	1.925.911.300	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg	
			Peningkatan Mutu Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan setiap tahunnya						98 Sekolah	674.215.000	98 Sekolah	728.267.680	1 Keg	750.000.000	1 Keg	765.000.000
			Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMPN	Jumlah SMPN yang diberikan BOSDA setiap tahunnya	23072 Siswa	Siswa	4.282.889.100	38000 Siswa	4.567.307.800	38000 Siswa	11.889.227.400	38000 Siswa	12.000.000.000	1 Keg	12.250.000.000	1 Keg	12.500.000.000
			Beasiswa Khusus Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa khusus setiap tahunnya				180 Siswa	445.455.000	196 Siswa	340.899.000	196 Siswa	369.438.900	1 Keg	475.000.000	1 Keg	500.000.000
			Beasiswa Prestasi Tingkat SMP	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Prestasi setiap tahunnya				294 Siswa	691.528.000	294 Siswa	567.512.000	294 Siswa	607.519.250	1 Keg	615.000.000	1 Keg	625.000.000
			Penyaluran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah SMP Swasta	Jumlah SMP swasta yang diberikan BOSDA setiap tahunnya		3750 Siswa	702.642.400	26 Sekolah	770.217.800	23 Sekolah	1.939.074.400	23 Sekolah	2.080.630.408	1 Kab	2.100.000.000	1 Kab	2.250.000.000
			Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru dengan sistem Online	Jumlah sekolah SMP yang mengikuti Sistem Online Penerimaan Siswa Baru							401.668.200		449.400.000	1 Keg	475.000.000	1 Keg	500.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pelatihan Implementasi Kurikulum SD	Jumlah peserta pelatihan implementasi kurikulum setiap tahunnya	150 Orang	150 Orang	249.600.000	20 Sekolah	1.343.191.000	216 Orang	447.014.000	216 Orang	481.500.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	525.000.000
			Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional SD) Faerah SDN	Jumlah siswa yang menerima dana BOSDA SDN Kabupaten Bengkalis	69027 Siswa	69027 Siswa	9.409.779.900	86000 Siswa	9.473.258.400	1 Keg	13.511.042.400	1 Keg	14.457.367.488	1 Keg	14.650.000.000	1 Keg	15.000.000.000
			Penyaluran Dana Bos (Bantuan Operasional SD) Daerah SD Swasta	Jumlah siswa yang menerima dana BOSDA SD Swasta Kabupaten Bengkalis		9249 Siswa	1.280.694.900	32 Sekolah	1.299.603.400	10000 Siswa	1.874.096.200	10000 Siswa	1.988.163.576	1 Kab	2.000.000.000	1 Kab	2.000.000.000
			Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SD Sederajat	Jumlah siswa SD yang mengikuti Try Out Kabupaten Bengkalis						336 Sekolah	299.742.700	336 Sekolah	321.000.000	1 Keg	350.000.000	1 Keg	350.000.000
			Pelaksanaan Tryout Ujian Nasional SMP Sederajat	Jumlah siswa SMP yang mengikuti Try Out Kabupaten Bengkalis						1 Keg	500.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	500.000.000
			Bimtek Pengelola UKS Tingkat SMP sederajat	Jumlah peserta Bimtek UKS dilaksanakan						1 Keg	155.227.500	1 Keg	166.307.425	1 Keg	200.000.000	1 Keg	225.000.000
			Sosialisasi Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMP	Jumlah Operator yang mengikuti Workshop Aplikasi Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMP						98 Orang	277.728.600	98 Orang	258.811.600	1 Keg	275.000.000	1 Keg	300.000.000
			Pengiriman magang tenaga pendidik SMP sederajat	Jumlah guru, pengawas dan kepala sekolah yang mengikuti magang setiap tahunnya						11 Kec	424.135.000	11 Kec	551.892.090	1 Keg	575.000.000	1 Keg	600.000.000
			Pelaksanaan dan pemantauan penggunaan dana BOS SMP	Frekuensi dilakukannya sosialisasi/pemantauan terhadap sekolah yang menggunakan dana BOS setiap tahunnya				4 Kali	321.281.000	4 Kali	229.855.700	4 Kali	315.327.502	1 Keg	325.000.000	1 Keg	375.000.000
			Pelatihan Pemantapan Mutu Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pemantapan Mutu Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional setiap tahunnya						392 Guru	707.823.000	392 Guru	771.532.060	1 Keg	785.500.000	1 Keg	800.000.000
			Pelatihan Perangkat Pelajaran Guru Mata Pelajaran SMP sederajat	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Perangkat Pelajaran Guru Mata Pelajaran SMP setiap tahunnya						392 Guru	739.527.000	392 Guru	792.870.000	1 Keg	800.000.000	1 Keg	825.000.000
			Sosialisasi Akreditasi Sekolah SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Akreditasi Sekolah SMP						1 Keg	750.000.000	1 Keg	800.000.000	1 Keg	850.000.000	1 Keg	900.000.000
			Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Kepala Sekolah dan Guru SMP sederajat	Jumlah Kepala SMP yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti						100 Orang	337.922.500	100 Orang	359.725.695	1 Keg	400.000.000	1 Keg	420.000.000
			Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti Bagi Siswa SMP Kabupaten Bengkalis	Jumlah siswa SMP yang mengikuti Sosialisasi Penumbuhan Budi Pekerti di 8 Kecamatan						11 Kec	506.660.500	11 Kec	542.126.735	1 Kab	565.000.000	1 Kab	600.000.000
			Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP	Jumlah peserta bimtek						98 Orang	224.629.900	98 Orang	245.098.373	1 Keg	250.000.000	1 Keg	275.000.000
			Pelatihan Klinik Kompetensi Guru SMP Se Kabupaten Bengkalis	Jumlah peserta Pelatihan						98 Orang	554.550.000	98 Orang	649.897.670	1 Keg	650.000.000	1 Keg	670.500.000
			Implementasi penerapan kegiatan Pramuka pada Kurikulum di Sekolah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pramuka dalam kurikulum pendidikan						98 Sekolah	1.344.717.000	98 Sekolah	1.461.369.620	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg	1.750.000.000
			Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa	Jumlah peserta cerdas cermat, pidato, permainan rakyat tingkat SD						308 Siswa	969.328.000	308 Siswa	968.700.000	1 Keg	975.000.000	1 Keg	1.000.000.000
			Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP sederajat	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya		1 Keg	217.980.000	35 Orang	169.244.000	220 Siswa	777.781.500	220 Siswa	1.000.000.000	1 Keg	1.150.000.000	1 Keg	1.250.000.000
			Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD sederajat	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FLS2N setiap tahunnya		6 Cabang	297.000.000	112 Siswa	199.800.000	110 Siswa	754.269.000	110 Siswa	800.000.000	1 Keg	825.000.000	1 Keg	850.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya		1 Keg	146.250.000	30 Siswa	150.000.000	66 Siswa	320.142.500	66 Siswa	342.931.255	1 Keg	350.000.000	1 Keg	375.000.000
			Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti OSN setiap tahunnya		1 Keg	145.500.000	64 Siswa	149.299.000	132 Siswa	194.992.500	132 Siswa	208.641.975	1 Keg	225.000.000	1 Keg	250.000.000
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN setiap tahunnya		1 Keg	146.250.000	30 Siswa	150.000.000	66 Siswa	320.142.500	66 Siswa	342.931.255	1 Keg	350.000.000	1 Keg	375.000.000
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti O2SN setiap tahunnya		1 Keg	267.536.000	38 Siswa	310.570.000	330 Siswa	752.124.000	330 Siswa	800.000.000	1 Keg	814.250.000	1 Keg	825.000.000
			Beasiswa Prestasi Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Prestasi Akademik setiap tahunnya				330 Siswa	739.102.000	1008 Siswa	1.630.998.000	1008 Siswa	1.750.034.220	1 Keg	1.855.000.000	1 Keg	2.000.000.000
			Beasiswa Khusus Tingkat SD	Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswa Non Akademik bidang setiap tahunnya				150 Siswa	547.677.000	200 Siswa	493.808.600	200 Siswa	535.000.000	1 Keg	545.000.000	1 Keg	575.000.000
			Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD	Jumlah peserta cerdas cermat tingkat SD						66 Siswa	171.796.000	66 Siswa	183.821.720	1 Keg	200.000.000	1 Keg	2.500.000.000
			Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis	Jumlah siswa SMP yang mengikuti Gebyar Prestasi SMP se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya						11 Kec	532.506.000	11 Kec	576.814.530	1 Keg	600.000.000	1 Keg	625.000.000
			Penyelenggaraan Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyelenggaraan LPIR Kabupaten Bengkalis						11 Kec	244.446.500	11 Kec	261.557.755	1 Keg	275.000.000	1 Keg	300.000.000
			Lomba Sekolah Terbaik Penumbuhan Budi Pekerti Tingkat SMP	Objek Sekolah sebagai penghargaan sekolah terbaik Penumbuhan budi pekerti tingkat SMP						98 Sekolah	253.638.000	98 Sekolah	273.190.260	1 Keg	295.000.000	1 Keg	325.000.000
			Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten Bengkalis						98 Sekolah	187.310.000	98 Sekolah	200.421.700	1 Kab	225.500.000	1 Kab	250.000.000
			Lomba budaya mutu tingkat SD	Jumlah siswa yang mengikuti lomba budaya mutu						30 Sekolah	419.929.000	30 Sekolah	475.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	525.000.000
			Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumah sekolah yang dilakukan pembinaan dan penilaian Akreditasi						50 Sekolah	102.300.000	50 Sekolah	300.000.000	1 Kab	325.000.000	1 Kab	350.000.000
			Peningkatan Mutu musyawarah Guru (MGMP)	Penempatan tenaga pendidik terpetakan						11 Kec	425.278.600	11 Kec	459.030.000	1 Keg	475.000.000	1 Keg	500.000.000
			Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N -SD)	Jumlah siswa yang mengikuti Festival dan Lomba Literasi Nasional Tingkat Sekolah Dasar (FL2N -SD)								55 siswa	300.000.000	1 Keg	350.000.000	1 Keg	400.000.000
			Pantauan dan Evaluasi Kegiatan PIP	Jumlah Siswa SD Penerimaan KIP dan PIP Tahun 2019								1 kegiatan	120.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	200.000.000
			KIHAJAR DEWANTARA AWARD TINGKAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN BENGKALIS	Jumlah siswa yang mengikuti lomba Khajar Dewantara Award								1 kegiatan	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000
			Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSN)	Jumlah pengiriman naskah keningkat nasional								11 Kecamatan	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000
			Olimpiade Literisasi Siswa Nasional (OLSN)	Jumlah pengiriman naskah keningkat nasional								11 Kecamatan	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000
			Lomba Menulis Esai Siswa (LMES)	Jumlah pengiriman naskah keningkat nasional								11 Kecamatan	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000
			Gala Siswa Indonesia (GSI)	Jumlah Sekolah yang mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)								11 Kecamatan	750.000.000	1 Keg	800.000.000	1 Keg	850.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pelatihan Literisasi Siswa SMP	Jumlah Sekolah yang mengikuti Literisasi Siswa SMP								11 Kecamatan	322.500.000	1 Keg	350.000.000	1 Keg	400.000.000
			Program Non Formal														
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket C setiap tahunnya	9 Lembaga	9 Lembaga	134.744.900	9 Lembaga	150.000.000	700 Orang	188.004.000	700 Orang	200.000.000	700 Orang	235.000.000	700 Orang	250.000.000
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket A setiap tahunnya	9 Lembaga	9 Lembaga	85.639.200	9 Lembaga	104.522.000	120 Orang	100.079.200	120 Orang	107.084.744	120 Orang	115.000.000	120 Orang	135.000.000
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Kabupaten Bengkulu	Jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional paket B setiap tahunnya	9 Lembaga	9 Lembaga	108.598.000	9 Lembaga	126.874.000	432 Orang	113.303.000	432 Orang	121.234.210	100%	135.500.000	432 Orang	150.000.000
			Penyelenggaraan Keterampilan Terapan Kabupaten Bengkulu		60 Orang	50 Orang	571.000.000			650 Orang	296.560.000	650 Orang	535.000.000	650 Orang	550.000.000	650 Orang	565.000.000
			Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah peserta ujian nasional paket A yang mengikuti bimbingan setiap tahunnya	9 Lembaga	9 Lembaga	576.155.000	9 Lembaga	250.000.000	60 Orang	250.000.000	60 Orang	267.500.000	60 Orang	275.500.000	60 Orang	300.000.000
			Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah peserta ujian nasional paket C yang mengikuti bimbingan setiap tahunnya	9 Lembaga	9 Lembaga	929.432.100	9 Lembaga	479.432.100	126 Orang	393.932.100	126 Orang	519.992.347	126 Orang	535.250.000	126 Orang	565.000.000
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah peserta ujian nasional paket B yang mengikuti bimbingan setiap tahunnya	9 Lembaga	9 Lembaga	747.427.200	9 Lembaga	397.427.200	98 Orang	397.427.200	98 Orang	425.247.104	98 Orang	450.000.000	98 Orang	475.500.000
			Peningkatan Sumber Daya Masyarakat ButaAksara	Persentase Pendidikan Non Formal				9 Lembaga	250.000.000	100%	244.204.000	100%	250.000.000	100%	265.000.000	100%	285.000.000
			Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan														
			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah guru yang direkrut untuk mendapatkan sertifikasi	1 Tahun	32 Orang	274.912.300		275.000.000	300 Orang	248.230.000	300 Orang	264.897.822	300 Orang	275.000.000	300 Orang	300.000.000
			Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kompetensi keprofesionalitas setiap tahunnya						120 Orang	629.944.000	120 Orang	674.040.080	120 Orang	685.500.000	120 Orang	700.000.000
			Rapat Kerja Pengawas Sekolah	Kinerja pengawas sekolah yang terevaluasi	60 Orang	60 Orang	92.750.000	45 Orang	74.168.000	41 Orang	75.000.000	41 Orang	80.250.000	41 Orang	85.250.000	41 Orang	90.000.000
			Forum komunikasi operator sekolah	Jumlah operator sekolah yang ditingkatkan kapasitas setiap tahunnya	555 Orang	555 Orang	2.269.634.900	857 Orang	3.500.000.000	857 Orang	3.500.000.000	1 Keg	3.745.000.000	1 Keg	3.850.000.000	1 Keg	4.000.000.000
			Beasiswa Guru	Jumlah guru yang mendapatkan beasiswa S1, S2 dan S3 dalam satu tahun	1 Keg	1 Keg	1.532.786.000	322 Orang	532.786.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	650.000.000	1 Keg	700.000.000	1 Keg	750.000.000
			Musyawarah Kerja Guru PAUD Kecamatan se - Kabupaten Bengkulu	Jumlah guru PAUD yang mengikuti Musker setiap tahunnya				36 Orang	100.000.000	50 Orang	135.000.000	50 Orang	144.450.000	50 Orang	165.000.000	50 Orang	175.000.000
			Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Sekolah Swasta)	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan (sekolah swasta) yang menerima honorarium setiap tahunnya			4.000.000.000	1200 Orang	1.400.000.000	1200 Orang	4.400.000.000	1200 Orang	4.400.000.000	1200 Orang	4.400.000.000	1200 Orang	4.400.000.000
			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (Sharing Provinsi)	Jumlah tenaga pendidik yang dikirimkan untuk mengikuti pendidikan lanjutan setiap tahunnya	148 Orang	63 Orang	746.067.000	57 Orang	750.000.000	57 Orang	800.000.000	57 Orang	800.000.000	57 Orang	850.000.000	57 Orang	850.000.000
			Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000.000	1939 Orang	5.492.400.000	1939 Orang	5.500.000.000	1939 Orang	5.500.000.000	1939 Orang	5.500.000.000	1939 Orang	5.500.000.000
			Peningkatan Mutu Bagi Pengelola LKP dan PKBM	Terlaksananya Peningkatan Mutu Bagi Pengelola LKP dan PKBM							600.000.000		642.000.000		650.000.000		65.500.000
			Revolusi mental PTK melalui pelatihan peningkatan potensi keprofesionalitas	Peningkatana kopetensi keprofesionalitas						1 Keg	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	300.000.000
			Penanganan Kasus Kepegawaian di Satuan Pendidikan (baru)	Kasus di satuan pendidikan dapat segera terselesaikan						100%	114.366.000	100%	120.000.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Dikdas	Guru yang profesional	8 Kec	8 Kec	284.761.500	8 Kec	284.438.600	8 Kec	300.000.000	8 Kec	350.000.000	8 Kec	400.000.000	8 Kec	450.000.000
			Penilaian angka kredit jabatan guru dan pengawas sekolah-sekolah	Penghargaan guru terlayani	1 Keg	1 Keg	373.578.850	32 Orang	332.822.100	350 Orang	368.696.000	350 Orang	396.717.295	350 Orang	400.000.000	350 Orang	400.000.000
			Penyelenggaraan Seleksi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi/berdedikasi	Guru yang profesional				500 Orang	500.000.000	36 Orang	500.000.000	36 Orang	535.000.000	36 Orang	550.000.000	36 Orang	560.000.000
			Diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah	Calon kepala sekolah yang terlatih	59 Orang			60 Orang	1.000.000.000	60 Orang	834.208.350	60 Orang	1.070.000.000	60 Orang	1.075.000.000	60 Orang	1.100.000.000
			Pelatihan guru Agama, Olahraga, Kesenian	Guru yang terlatih				75 Orang	200.000.000	40 Orang	200.000.000	40 Orang	214.000.000	40 Orang	225.000.000	40 Orang	250.000.000
			Rapat koordinasi peningkatan mutu pendidikan	Penghargaan guru terlayani	603 Orang	603 Orang	787.112.000	603 Orang	649.927.500	603 Orang	710.531.000	603 Orang	802.500.000	603 Orang	850.000.000	603 Orang	875.000.000
			Percepatan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidikan	Penghargaan guru terlayani	1 Keg	1 Keg	302.270.500	34 Orang	312.545.500	175 Orang	302.102.000	175 Orang	323.429.435	175 Orang	350.000.000	175 Orang	365.000.000
			Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Teratasinya kebutuhan guru	1 Tahun	1 Tahun	48.463.544.500	2193 Orang	29.448.273.000	2193 Orang	29.453.173.300	2193 Orang	31.514.895.431	2193 Orang	31.515.000.000	2193 Orang	31.515.000.000
			Pelaksanaan OSN Guru	Kompetisi guru sain meningkat				40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000
			Pelatihan Pengembangan Guru kelas Tingkat SD	Guru kelas yang terlatih		235 Orang	199.250.000	90 Orang	369.155.000	90 Orang	247.995.500	90 Orang	265.364.342	90 Orang	375.000.000	90 Orang	395.000.000
			Pelatihan Pengembangan Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP	Guru mata pelajaran yang terlatih		40 Orang	198.750.000	90 Orang	345.000.000	80 Orang	233.376.000	80 Orang	249.774.442	80 Orang	245.000.000	80 Orang	265.500.000
			Pelatihan Pengembangan Guru Kelas Tingkat PAUD/TK	Guru kelas yang terlatih						1 Keg	367.295.400	1 Keg	369.155.000	1 Keg	375.000.000	1 Keg	385.000.000
			Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Penempatan tenaga pendidik terpetakan	1 Keg	1 Keg	160.905.200	24 Orang	199.410.800	24 Orang	199.600.000	24 Orang	214.000.000	24 Orang	225.000.000	24 Orang	230.000.000
			Peningkatan Mutu musyawarah Guru (MGMP)	Penempatan tenaga pendidik terpetakan						11 Kec	425.278.600	11 Kec	459.030.000	1 Keg	475.000.000	1 Keg	500.000.000
			Pembinaan KKS & MKKS	Kinerja guru mata pelajaran terevaluasi						1 Keg	250.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	350.000.000	1 Keg	400.000.000
			Rapat koordinasi Organisasi Profesi Kependidikan (PGRI & IGTKI)	Kinerja kepala sekolah terevaluasi						1 Keg	250.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg	350.000.000	1 Keg	400.000.000
			Diklat Penilai angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah	Aspirasi guru terkoordinir						40 Orang	162.650.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	315.000.000	40 Orang	325.000.000
			Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Jumlah guru dan pengawas sekolah yang diberi penilaian angka kredit setiap tahunnya						1 Keg	485.508.000	1 Keg	513.600.000	1 Keg	525.000.000	1 Keg	550.000.000
			Diklat guru PAUD/TK	Rapat kerja anggota PGRI dan IGTKI dapat dilaksanakan setiap tahunnya						40 Orang	368.482.100	40 Orang	400.000.000	40 Orang	425.000.000	40 Orang	450.000.000
			Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Islam	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan madrasah yang dibayar jasanya					22.086.150.000	3635 Orang	22.086.150.000	3635 Orang	22.086.150.000	3635 Orang	22.086.150.000	3635 Orang	22.086.150.000
			Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Terlaksananya Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan						1 Kegiatan	1.000.000.000	1 Kegiatan	1.200.000.000	1 Kegiatan	1.500.000.000	1 Kegiatan	2.000.000.000
			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (S2 PAUD)							1 Kegiatan	1.250.000.000	1 Kegiatan	1.500.000.000	1 Kegiatan	1.750.000.000	1 Kegiatan	2.000.000.000
			Penilaian PAUD sebagai PAUD Unggulan							1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	300.000.000
			Kenaikan Insentif Bagi Guru PAUD (TK, KB, TPA, SPS, TAM) Non PNS							1 Kegiatan	12.000.000.000	1700 Orang	12.375.000.000	1 Kegiatan	13.000.000.000	1 Kegiatan	13.500.000.000
			Kurikulum 2013 didalam Implementasinya menurut Sikap Guru Menuasai IT							1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	350.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	450.000.000
			Pengadaan ATS dan PKBM Kabupaten Bengkulu							1 Kegiatan	450.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	550.000.000	1 Kegiatan	600.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Pembinaan Karakter TK Negeri Sebagai Tindak Lanjut PAUD-HI yang Bekerjasama dengan Kepolisian, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Kementerian Agama							1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	350.000.000
			Diklat Penguatan Kinerja Kepala Sekolah	Terciptanya Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah						1 Kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	750.000.000	1 Kegiatan	850.000.000	1 Kegiatan	900.000.000
			Diklat Penguatan Kinerja Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan	Terciptanya Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Pengawas Sekolah						1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	350.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	450.000.000
			Peningkatan Penyelenggaraan Guru Bantu Provinsi	Kesejahteraan Guru Bantu Provinsi						1 Kegiatan	250.000.000	1 Tahun	283.992.000	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	400.000.000
			Penilaian Kinerja Guru PAUD	Peserta mendapat bimbingan teknis calon PKG PAUD						1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	295.497.000	1 Kegiatan	350.000.000	1 Kegiatan	400.000.000
			Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD (S1 PAUD)							1 Kegiatan	1.100.000.000	1 Kegiatan	1.450.164.500	1 Kegiatan	1.750.000.000	1 Kegiatan	2.000.000
			Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya penanganan kasus kepegawaian kependidikan						1 Kegiatan	100.000.000	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	200.000.000
			Diklat Guru PAUD Kreatif	Terlaksananya kreatifitas Guru PAUD						1 Kegiatan	550.000.000	1 Kegiatan	600.000.000	1 Kegiatan	650.000.000	1 Kegiatan	700.000.000
			Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Terlaksananya kompetensi bagi pengawas sekolah						1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	600.000.000	1 Kegiatan	650.000.000	1 Kegiatan	700.000.000
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan														
			Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peserta rapat koordinasi Kepala Sekolah se Kabupaten Bengkalis						1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	1.177.000.000	1 Tahun	1.200.000.000	1 Tahun	1.225.000.000
			Pembinaan Komite Sekolah								250.000.000		267.500.000		275.000.000		300.000.000
			Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya media dan system informasi manajemen pendidikan						1 Keg	250.000.000	1 Keg	267.500.000	1 Keg	275.000.000	1 Keg	300.000.000
			Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa pendidikan tinggi setiap tahunnya				1 Keg	2.465.188.100	1 Keg	2.500.000.000	1 Keg	3.000.000.000	1 Keg	3.500.000.000	1 Keg	4.000.000.000
			Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan hukum dalam satu tahun				1 Keg	250.000.000	336 Sekolah	275.645.000	336 Sekolah	375.000.000	336 Sekolah	400.000.000	336 Sekolah	450.000.000
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
Tercapainya tata pelayanan pendidikan yang baik	Meningkatnya kinerja pembinaan terhadap pengembangan pendidikan	- Persentase ketuntasan pelayanan dasar pendidikan - Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan PD	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu Tahun; Jumlah Tenaga Jasa Administrasi yang tersedia setiap tahunnya	45 Orang, 4800 Lembar	45 Orang, 4800 Lembar	871.800.000	45 Orang, 3000 Lembar	1.735.800.000	45 Orang, 4700 Lembar	1.735.800.000	45 Orang, 4700 Lembar	1.944.096.000	45 Orang, 4800 Lembar	2.000.000.000	45 Orang, 4800 Lembar	2.000.000.000
			Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Tersedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	492.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	448.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	455.000.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diurus izinnya dalam satu tahun				12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	150.000.000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	35 Item, 18 Orang	35 Item, 18 Orang	409.030.000	35 Item, 18 Orang	410.000.000	28 Jenis, 18 Orang	400.619.000	28 Jenis, 18 Orang	438.700.000	30 Jenis, 18 Orang	450.000.000	30 Jenis, 18 Orang	475.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam satu tahun	40 Jenis	40 Jenis	300.000.000	40 Jenis	300.000.000	39 Jenis	300.000.000	39 Jenis	336.000.000	39 Jenis	350.000.000	39 Jenis	368.000.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	22 Jenis	14 Jenis	200.000.000	10 Jenis	200.000.000	10 Jenis	224.000.000	10 Jenis	200.000.000	10 Jenis	200.000.000	10 Jenis	200.000.000
			Penyediaan Komponen Istilasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi dan penerangan kantor yang disediakan dalam satu tahun	39 Jenis	16 Jenis	50.000.000	16 Jenis	50.000.000	16 Jenis	175.000.000	16 Jenis	196.000.000	18 Jenis	200.000.000	18 Jenis	200.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang - undangan yang disediakan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	100.000.000	10 Jenis	200.000.000	10 Jenis	224.000.000	10 Jenis	230.000.000	10 Jenis	245.000.000
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam satu tahun	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	248.700.000	1 Tahun	248.700.000	1 Tahun	278.544.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	300.000.000
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah pakaian kerja yang disediakan	18 Orang	18 Orang	581.300.000	18 Orang	581.300.000	20 Orang	368.400.000	20 Orang	400.000.000	20 Orang	400.000.000	20 Orang	400.000.000
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	1.552.023.000	12 Bulan	1.200.000.000	12 Bulan	1.500.000.000	12 Bulan	1.680.000.000	12 Bulan	1.750.000.000	12 Bulan	2.000.000.000
			Supervisi Akademik dan Manajerial Sekolah	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi Pengawas ke luar dan dalam daerah pada satu tahun	8 Kec	8 Kec	550.000.000	8 Kec	390.000.000	8 Kec	400.000.000	8 Kec	448.000.000	8 Kec	460.000.000	8 Kec	475.000.000
			Penyediaan jasa sopir kantor	Jumlah tenaga supir kantor dan pustaka keliling yang disediakan dalam satu tahun	3 Orang	3 Orang	57.600.000	3 Orang	57.600.000	3 Orang	57.600.000	3 Orang	64.512.000	3 Orang	64.512.000	3 Orang	64.512.000
			Publikasi Informasi Pembangunan		2 Keg					1 Keg	600.000.000	1 Keg	650.000.000	1 Keg	700.000.000	1 Keg	750.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis	12 Bulan	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	448.000.000	12 Bulan	460.000.000	12 Bulan	475.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bantan	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bantan	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	212.800.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	250.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	212.800.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	250.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siak Kecil	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	212.800.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	250.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mandau	12 Bulan	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	336.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	375.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir	12 Bulan	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	245.000.000	12 Bulan	274.400.000	12 Bulan	285.000.000	12 Bulan	300.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rupert	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	212.800.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	250.000.000
			Penyediaan Dana Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Rupert Utara	Tersedianya operasional penunjang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rupert Utara	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	212.800.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	250.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Kondisi Ext Th 2015	TARGET KINERJA											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Targ	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Jenis Laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun	6 Dokumen	6 Dokumen	175.000.000	8 Laporan	75.000.000	8 Laporan	75.000.000	8 Laporan	80.250.000	8 Laporan	85.000.000	8 Laporan	95.000.000
			Penyusunan Pelaporan SPM	Jenis Laporan yang disusun dan disiapkan dalam satu tahun				1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan														
			Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah dokumen laporan tentang hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan						1 Keg	250.000.000	1 Keg	267.500.000	1 Keg	275.000.000	1 Keg	280.000.000
			Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya						10 Kantor	750.000.000	10 Kantor	802.500.000	10 Kantor	825.000.000	10 Kantor	850.000.000
			Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya media dan system informasi manajemen pendidikan						1 Keg	250.000.000	1 Keg	267.500.000	1 Keg	275.000.000	1 Keg	300.000.000
			Sosialisasi Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan	Frekuensi dilakukannya sosialisasi bengkalis sebagai pusat pendidikan setiap tahunnya	1 Keg	1 Keg	994.800.000	1 Keg	450.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	550.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	650.000.000
			Penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Frekuensi dilakukannya sosialisasi bengkalis sebagai pusat pendidikan setiap tahunnya						1 Keg	450.000.000	1 Keg	481.500.000	1 Keg	495.000.000	1 Keg	500.000.000
			Penyediaan / Pemeliharaan Jaringan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan jaringan pendidikan setiap tahunnya	1 Tahun	1 Tahun	800.000.000	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	850.000.000	1 Tahun	385.000.000	1 Tahun	400.000.000
			Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah Kantor yang disusun untuk standar pelayanan bidang pendidikan setiap tahunnya		1 Dok	150.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	750.000.000	1 Dok	802.500.000	1 Dok	810.000.000	1 Dok	825.000.000
			Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi	Jumlah lembaga pendidikan yang dibantu Operasional setiap tahunnya				1 Lembaga	2.309.412.200	1 Keg	2.500.000.000	1 Keg	2.600.000.000	1 Keg	2.750.000.000	1 Keg	3.000.000.000
			Pengelolaan website Dinas pendidikan	Jumlah website dinas pendidikan yang dikelola setiap tahunnya	1 Tahun	1 Tahun	121.740.000	1 Tahun	106.844.600	1 Kantor	106.844.600	1 Kantor	114.323.722	1 Kantor	125.000.000	1 Kantor	150.000.000
			Penyusunan buletin pendidikan Kabupaten Bengkulu	Jumlah buletin pendidikan yang dicetak setiap tahunnya	1 Keg	1 Keg	250.000.000	1000 Eks	328.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg	350.960.000	1 Keg	375.000.000	1 Keg	400.000.000
			Sentral data dan pelayanan administrasi dasar	Jumlah pelayanan administrasi data pendidikan yang dilakukan setiap tahunnya		1 Keg	125.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	267.500.000	1 Keg	275.000.000	1 Keg	300.000.000
			Penyusunan profil pendidikan	Jumlah sekolah yang disusun profil setiap tahunnya		1 Keg	350.000.000	447 Sekolah	75.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	107.000.000	1 Keg	125.000.000	1 Keg	150.000.000
			Pemetaan Pembangunan Pendidikan	Tersedianya data tentang penyebaran pendidikan						1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	535.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	575.000.000
			Penyelenggaraan peringatan hari Pendidikan Nasional	Frekuensi dilakukan peringatan hari pendidikan nasional setiap tahunnya	1 Keg	1 Keg	655.500.000	1 Keg	650.000.000	1 Keg	783.472.000	1 Keg	850.000.000	1 Keg	875.000.000	1 Keg	900.000.000
			Analisa Satuan Biaya Peserta Didik	Data Perhitungan Biaya Peserta Didik Per Satuan Pendidikan				1 Keg	450.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	550.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	650.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Rangkaian tahapan dimaksud bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu dicantumkan Indikator kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau dikawal didalam tiap-tiap Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap perangkat daerah mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran pemerintahan daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Data Awal (2015)	Target Capaian Kinerja Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Siswa Terhadap Kelas	27 : 1	27 : 1	25 : 1	24 : 1	22 : 1	20 : 1	20 : 1
	Persentase ketersediaan sarana disekolah	65	70	75	85	88	90	95
	Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk	40.65	48.78	50.5	60	60.5	60.5	70
	Persentase sekolah yang layak dan baik	76	80	84.5	90	99	100	100
2.	Angka Kelulusan	63	66	70	80	85	90	100
	Angka Melanjutkan Sekolah	90	90	92	95.5	97.5	99	100
	Angka Putus Sekolah (APS)	0.2	0.2	0.15	0.12	0.08	0.05	0.03
	Indek Prestasi siswa	60	60	65	72	78	90	100
	Persentase menurunnya kenakalan anak/peserta didik	22	18	12	8	5	0	0
	Persentase Guru yang memenuhi kompetensi	45	49.5	52.6	70	75	80	90
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	95	95	89	95	99.5	100	100
	Rasio Guru Terhadap siswa	1 : 17	1 : 17	1 : 15	1 : 14	1 : 13	1 : 12	1 : 11
3.	Persentase ketuntasan pelayanan dasar pendidikan	90	90	98	98	100	100	100
	Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan PD	12	12	15	18	20	23	25

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021, sehingga diharapkan terjadi keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok fungsi dinas pendidikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, merupakan panduan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis serta pemangku kepentingan lainnya (stake holders) dalam melakukan perencanaan, pembangunan dan pengawasan dibidang pendidikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis wajib mempedomani renstra yang telah disusun dalam merumuskan rencana kinerja tahunan (Renja).

Walaupun kurun waktu berlakunya Renstra Dinas Pendidikan berakhir pada tahun 2021, namun juga masih berlaku bagi acuan perencanaan kinerja pada masa transisi, sehingga berlaku juga sebagai acuan dalam penyusunan renja dinas pendidikan tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra Tahun 2022-2027 sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan visi dan misi pada RPJMD baru .

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, serta perubahan kebijakan secara berjenjang maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat tentang perbaikan terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sehingga perubahan dan penyesuaian dapat memenuhi tuntutan dinamika perkembangan zaman.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras demi tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021.

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd.
Pembina
NIP: 19660514 198811 1 008